

SKRIPSI

**PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN
STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP OPTIMALISASI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Oleh

ILHAM PERDANA PUTRA

NPM: 2202110100



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ILHAM PERDANA PUTRA
NPM: 2202110100

Dengan judul:

**PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR BIROKRASI
TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, SE., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Intan Rizkia Chudri, SE., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Pembimbing II

Fitri Yunina, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. Fajri Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ILHAM PERDANA PUTRA
NPM: 2202110100

Dengan judul:

**PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR BIROKRASI
TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal, 12 Februari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si.,MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Intan Rizkia Chudri, SE., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota

Fitri Yunina, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 5 Maret 2025
Yang Menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
070B5AMX129207845

Ilham Perdana Putra

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilham Perdana Putra
NPM : 2202110100
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,



METERAI TEMPEL
FB1F1AMX129207840

Ilham Perdana Putra

**PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR
BIROKRASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH PADA PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**ILHAM PERDANA PUTRA
2202110100**

Pembimbing I : Intan Rizkia Chudri, S.E., M. Si

Pembimbing II: Fitri Yunina, S.E., M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh 66 responden dari 33 SKPD. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD, dengan koefisien korelasi sebesar 0,689 dan kontribusi determinasi sebesar 47,5%. Secara parsial, inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dengan koefisien regresi 0,241, legal audit dengan koefisien 0,240, dan struktur birokrasi dengan koefisien 0,266. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa inventarisasi aset yang baik, legal audit berkala, dan struktur birokrasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset daerah.

Kata Kunci: Inventarisasi Aset, Legal Audit, Struktur Birokrasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, SKPD

**THE INVENTORY OF ASSET INVESTMENT, LEGAL AUDIT AND
BUREAUCRATIC STRUCTURE AND OPTIMIZATION OF
REGIONAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE
GOVERNMENT OF ACEH BESAR DISTRICT**

**ILHAM PERDANA PUTRA
2202110100**

Supervisor I : Intan Rizkia Chudri, S.E., M. Si

Supervisor II: Fitri Yunina, S.E., M. Si

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of asset inventory, legal audit, and bureaucratic structure on the optimization of Regional Property Management (BMD) in Regional Work Units (SKPD) in Aceh Besar Regency. This study uses a quantitative approach with data collection through questionnaires filled out by 66 respondents from 33 SKPDs. Data analysis was carried out using multiple linear regression methods. The results of the study indicate that simultaneously, the variables of asset inventory, legal audit, and bureaucratic structure have a significant positive effect on the optimization of BMD management, with a correlation coefficient of 0.689 and a determination contribution of 47.5%. Partially, asset inventory has a positive effect with a regression coefficient of 0.241, legal audit with a coefficient of 0.240, and bureaucratic structure with a coefficient of 0.266. This study identifies that good asset inventory, periodic legal audits, and effective bureaucratic structures can improve the efficiency and transparency of regional asset management.

Keywords *Asset Inventory, Legal Audit, Bureaucratic Structure, Management of Regional Assets, SKPD*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari ketika membuat proposal ini banyak masalah yang dihadapi, namun kemudahan yang diberikan Allah SWT membuat penulis kuat menghadapi masalah tersebut. Penulis merasa masih banyak kesalahan dari proposal ini, hal itu semata-mata karena kekurangan penulis. Untuk itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan pada proposal ini. Penulis berharap proposal ini bisa diterima. Semoga terdapat manfaat pada proposal ini yang bisa berguna dan diaplikasikan ke dalam lingkup masyarakat. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua Ibunda Novia Sari dan Bapak Saiful Bahri, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah dan pengorbanan dan kerja keras yang di lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apaun. Terima kasih untuk selalu ada di sisi penulis dan menjadi alasan penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bapak Drs. Tarmidzi Gadeng SE,M.SI, MM selaku Dekan dan Ibu Syamsidar SE,M Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Intan Rizkia Chudri, SE,M,Si dan Ibu Fitri Yunina, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
4. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada adik tercinta, Izzaty Ammayya Putri karena selalu memberikan support dan semangat kepada abangnya dan juga memberikan bantuan baik material maupun non-material. Dan selalu ada disaat suka maupun duka.
6. Kepada Ghalda Wafiyyah yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik kepada penulis baik secara materi maupun dukungan moral. Yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan sarjana-1 ini. Tolong hidup lebih lama di dunia

ini, izinkan saya untuk membalas segala pengorbanan yang sudah di lakukan selama ini

7. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu mengendalikan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Banda Aceh, 5 Maret 2025
Penulis

Ilham Perdana Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teoritis.....	10
2.1.1 Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	10
2.1.1.1 Pengertian Barang Milik Daerah.....	10
2.1.1.2 Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	12
2.1.1.3 Indikator Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	15
2.1.2 Inventarisasi Aset	16
2.1.2.1 Pengertian Inventarisasi Aset.....	16
2.1.2.2 Tujuan Inventarisasi Aset.....	18
2.1.2.3 Indikator Inventarisasi Aset	20

2.1.3	Legal Audit.....	20
2.1.3.1	Pengertian Legal Audit	20
2.1.3.2	Fungsi dan Tujuan Legal Audit.....	23
2.1.3.3	Indikator Legal Audit.....	25
2.1.4	Struktur Birokrasi.....	26
2.1.4.1	Pengertian Struktur Birokrasi.....	26
2.1.4.2	Bentuk Struktur Birokrasi	27
2.1.4.3	Indikator Struktur Birokrasi	29
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	32
2.3	Kerangka Pemikiran	35
2.3.1	Hubungan Inventarisasi aset dan Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	35
2.3.2	Hubungan Legal Audit dan Optimalisasi Pengelolaan BMD	36
2.3.3	Hubungan Struktur Birokrasi dan Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	36
2.4	Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Desain Penelitian	39
3.1.1	Lokasi dan Objek Penelitian	39
3.1.2	Jenis Penelitian	39
3.1.3	Horizon Waktu	39
3.1.4	Unit Analisis.....	40
3.2	Populasi dan Sampel.....	40
3.2.1	Populasi	40
3.2.2	Sampel	40
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	44
3.5	Teknik Analisis Data	46
3.6	Pengujian Data	46
3.6.1	Uji Validitas	46
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	47

3.7	Pengujian Hipotesis	48
3.7.1	Uji Secara Simultan.....	48
3.7.2	Uji Parsial.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Karakteristik Responden.....	50
4.2	Deskriptif Variabel Penelitian	52
4.2.1	Variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD	52
4.2.2	Variabel Inventarisasi Aset	54
4.2.3	Variabel Legal Audit.....	55
4.2.4	Variabel Struktur Birokrasi	57
4.3	Hasil Pengujian Data	59
4.3.1	Hasil Uji Instrumen	59
4.3.1.1	Hasil Uji Validitas.....	59
4.3.1.2	Hasil Uji Reliabilitas	61
4.3.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	62
4.3.2.1	Hasil Pengujian Normalitas.....	62
4.3.2.2	Pengujian Multikolinieritas	63
4.3.2.3	Heteroskedastisitas	64
4.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	65
4.4.1	Koefisien Regresi (β)	66
4.4.2	Koefisien Korelasi dan Determinasi	68
4.4.3	Pengujian Hipotesis.....	69
4.4.3.1	Pengujian Hipotesis Secara Simultan.....	69
4.4.3.2	Pengujian Hipotesis Secara Parsial	71
4.5	Implikasi Hasil Penelitian.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	333
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	41
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	44
Tabel 3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian	44
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	50
Tabel 4.2 Gambaran Optimalisasi Pengelolaan BMD Pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar	52
Tabel 4.3 Gambaran Inventarisasi Aset pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar	54
Tabel 4.4 Gambaran Legal Audit BMD pada SKPD Kabupaten Aceh Besar	55
Tabel 4.5 Gambaran Struktur Birokrasi pada SKPD Kabupaten Aceh Besar	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.9 Hasil Analisis Model Regresi	66
Tabel 4.10 Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Uji Normalitas	62
Gambar 4.2 Scatterplot Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner.....	77
Lampiran 2. Data Tabulasi Kuesioner	81
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data	82
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas	87
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas	91
Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linier	94
Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan aset atau biasa dikenal dengan Barang Milik Daerah (BMD) adalah bagian yang sistematis dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan BMD yang efektif dan optimal menjadi isu yang semakin strategis saat ini sejalan dengan kompleksitas tugas-tugas pemerintah daerah dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik. Ketersediaan BMD yang mencukupi dan berkualitas akan dapat mendukung terwujudnya program kerja pemerintah daerah secara berkualitas. Bahkan pada beberapa instansi, BMD dapat menjadi penopang perolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah melalui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada disepanjang struktur keorganisasiannya perlu mengelola BMD secara efektif dan optimal.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diikuti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah telah membuat semakin besarnya tuntutan dan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah yang lebih optimal. Namun Pengaturan mengenai Pengelolaan BMD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMD belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan BMD di sejumlah daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan perubahan. Sehingga

untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD, maka pemerintah menerbitkan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD dan diikuti oleh lahirnya yaitu PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMD (Suwanda dan Yudi, 2022:1).

Bertambahnya BMD seiring dengan meningkatnya kegiatan pemerintah dan pembangunan, membuat pengelolaan BMD di lingkungan kerja pemerintah Daerah menjadi semakin kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Pengelolaan BMD saat ini tidak lagi sekadar administratif semata, melainkan lebih maju lagi yakni bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah. Semua itu akan terwujud melalui pengelolaan BMD yang lebih optimal, tertib, akuntabel, dan transparan. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan BMD belum dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penatausahaan dan pelaporan aset tetap sangatlah berarti terhadap kelayakan/kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam melakukan penilaian BMD dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup material karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan. Kemudian pengelolaan BMD selama ini lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik, dan sekadar kegiatan administratif semata sehingga dalam pelaksanaannya banyak timbul permasalahan, baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas maupun penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian keuangan daerah (Suwanda dan Yudi, 2022:3). Kecendrungan tersebut juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Dengan dukungan 27 SKPD yang berada di bawah perangkat organisasinya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus berinisiatif untuk menyusun program kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan publik, seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Besar telah menggunakan BMD yang di akui sebagai aset tetap.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah (PP No 28 Tahun 2020). Pengelolaan aset yang lebih optimal menjadi isu yang perlu ditingkatkan mengingat aset menjadi dari unsur keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Namun pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih menimbulkan berbagai permasalahan yang membuat tidak optimalnya pengelolaan aset seperti banyak aset yang tidak diketahui keberadaannya karena belum dikembalikan oleh setelah masa purna bhakti, penggunaan aset di luar kegiatan instansi, serta belum akurasinya informasi aset sehingga sering kali ditemukan aset yang dicatat dan dilaporkan

secara fisik tidak sesuai dengan jenis, jumlah, dan status aset. Ketidakakuratan informasi yang disajikan akan membuka peluang pihak-pihak tertentu berusaha menguasai atau mengambil alih aset tersebut. Selain itu, dari segi pembiayaan kadang kala aset yang tercatat tidak diketahui sumber dananya, baik yang didanai oleh APBD, hibah, sumbangan maupun lainnya. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi tidak optimalnya pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Besar termasuk diantaranya adalah inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi (Yulina *et al.*, 2021).

Inventarisasi aset adalah kegiatan mencatat dan menyusun daftar barang barang BMD yang ada secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Sesuai dengan amanat Permendagri tersebut, SKPD di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus telah melaksanakan inventarisasi BMD sesuai aturan yang berlaku untuk menyediakan data BMD secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD. Namun disejumlah SKPD masih ditemukan sejumlah BMD yang tercatat namun tidak terdapat barangnya dan ada sejumlah barang yang tidak tercatat.

Kemudian optimalisasi pengelolaan BMD di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Besar juga dipengaruhi oleh legal audit (Kuntadi,*et al.*, 2022). Legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang

berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan mencari solusi permasalahan hukum, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan legal audit adalah tindakan kegiatan pengamanan BMD atau tindakan pengendalian dan penertiban pengurusan BMD secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal serta terhindar dari pengambil alihan dari pihak lain. Pengamanan secara fisik untuk barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan oleh petugas keamanan. Sedangkan pengamanan secara administratif dibuktikan dengan penyelesaian bukti kepemilikan antara lain seperti IMB, Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Perjanjian, Akta Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.

Legal audit di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar merupakan pemeriksaan serta analisa hukum BMD oleh auditor pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah. Dengan demikian dapat diketahui apakah pengelolaan BMD di lingkungan pemerintah daerah ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku dan apakah ada BMD yang masih tidak memiliki legalisasi hukum. Legal audit membawa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk lebih waspada dan lebih peka untuk melengkapi dokumen dan bukti kepemilikan dari aset-aset Pemda. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tentunya menginginkan agar aset-aset

yang digunakan dan dimanfaatkan oleh jajaran SKPDnya berada pada titik aman dan tidak memberikan peluang bagi pihak lain yang ingin menguasai aset tersebut dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar juga menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik atas keabsahan dokumen-dokumen kepemilikan BMD, dan diharapkan setiap tahunnya aset yang dikuasainya memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap sehingga tidak menimbulkan masalah dan pertikaian aset dengan pihak lain kecuali tanah yang terletak pada lokasi yang terpisah. Sehingga jika legal audit dilaksanakan secara komprehensif maka pengelolaan BMD akan semakin optimal.

Selain inventarisasi barang dan legal audit, struktur birokrasi juga mempengaruhi optimalisasi pengelolaan barang dilingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar (Yulina *et al.*, 2021). struktur birokrasi merupakan tatanan atau struktur organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan agar lebih teratur termasuk posisi keberadaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan. Kondisi ini akan mempengaruhi aktivitas pengelolaan BMD secara lebih baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dinas yang menjadi kuasa pengguna anggaran untuk pengadaan BMD. Semua SKPD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah yang mendapat pembinaan secara langsung dari Inspektorat Daerah. Dengan struktur

tersebut, semua SKPD tersebut akan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah termasuk aset daerah sesuai Permendagri dan PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMD dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk pertanggungjawaban BMD. Kondisi tersebut akan ikut mempengaruhi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah

1. Apakah inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah inventarisasi aset secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah legal audit secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4. Apakah struktur birokrasi secara parsial berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi secara simultan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui pengaruh legal audit terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur birokrasi terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan pengelolaan BMD, inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi.
 - b. Sebagai wahana bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menyediakan bahan referensi dalam bentuk jurnal ilmiah untuk melengkapi penelitian lanjutan.
- b. Menambah kerangka teori baru mengenai pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Objek penelitian adalah pejabat daerah yang terlibat dalam siklus pengelolaan BMD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.1.1 Pengertian Barang Milik Daerah

BMD meliputi aset yang dimiliki pemerintah baik berupa aset tetap maupun aset lancar. Aset atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan bersumber dari APBD yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana kesejahteraan masyarakat (Yulina *et al.*, 2021). Menurut Wahyuni dan Rifki (2020: 1) menjelaskan Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Aset (*asset*) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda serta terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, ataupun individu perorangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset terdiri dari aset tetap dan aset lancar. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan seluruhnya masuk dalam kategori BMD. Sementara aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Dari seluruh aset lancar hanya persediaan yang masuk dalam kategori BMD.

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 menjelaskan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian Noviyati dan Rifki (2023) menjelaskan Barang Milik Daerah (BMD) adalah sebagai berikut:

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan asset Pemda baik yang berwujud bergerak yang dapat dibelanjakan seperti persediaan alat kantor maupun tidak bergerak (aset tetap) seperti tanah, mesin, pekerjaan dalam proses, jalan dan irigasi, yang mana kedua wujud tersebut diperoleh secara sah, dikuasai oleh Instansi Pemerintah Daerah dan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan.

Menurut Suwanda dan Yudi (2022:6) BMD merupakan salah satu kekayaan daerah yang digunakan sebagai alat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Wahyuni dan Rifki (2020: 6) menjelaskan barang publik atau *public ownership* adalah barang yang manfaatnya tidak dapat dicegah untuk dinikmati orang yang tidak membayar yaitu masyarakat secara bersama-sama. Barang publik umumnya dimiliki/dikuasai dan dioperasikan oleh pemerintah/negara.

Lebih jelas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan barang milik negara/daerah terdiri atas:

1. Barang yang pengadaannya atau diperoleh dengan beban APBD,
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.1.2 Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. BMD merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan BMD memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai BMD dari tahun ke tahun yang cukup signifikan (Suwanda dan Yudi, 2022:4)

Pengelolaan BMD dalam organisasi publik di kenal dengan Manajemen aset. Mitchell *et al.*, (2006: 1) dalam Wahyuni dan Rifki (2020: 7) manajemen aset merupakan suatu rangkaian kegiatan mengelola aset agar memberikan manfaat yang maksimal. Lebih lanjut Wahyuni dan Rifki (2020: 7) menjelaskan tentang manajemen aset sebagai berikut:

Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan sampai penghapusan serta di dalamnya pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Pengelolaan aset yang baik dan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset.

Suwanda dan Yudi (2022:2) menjelaskan pengelolaan BMD dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan orang dan mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hasting (2010: 4) dalam Wahyuni dan Rifki (2020: 7) menyatakan aktivitas manajemen aset mencakup sebagai berikut:

Aktivitas manajemen aset mencakup identifikasi aset apa yang diperlukan, identifikasi kebutuhan pendanaan, perolehan aktiva, penyediaan dukungan sistem logistik, dan pemeliharaan untuk aset serta penghapusan atau pembaruan aset. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan yang diinginkan.

Agar pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal maka Suwanda dan Yudi (2022:3) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut.

1. Fungsional, yaitu setiap pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD harus dilakukan sesuai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh hak informasi.
4. Efisiensi, yaitu arah pengelolaan BMD agar sesuai batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tupoksi secara optimal.
5. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*/rakyat.
6. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta neraca pemerintah.

Optimalisasi aset menurut Noviyati dan Rifki (2023) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola aset secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) dapat memberikan nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Jika pengelolaan aset Pemerintah Daerah optimal maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah. Kemudian Kuntadi *et al.*, (2022) menjelaskan optimalisasi aset merupakan wujud pemanfaatan dari sebuah aset yang kemudian dapat menghasilkan manfaat lebih atau juga menciptakan pendapatan.

Optimalisasi aset menurut Kuntadi *et al.*, (2022) adalah suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aset ditilik dari kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset itu sendiri. Nugent (2010) dalam Wahyuni dan Rifki (2020: 137) menjelaskan Optimalisasi aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Pengoptimalan aset harus dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan dengan menekan biaya operasional.

Kegiatan mengoptimalisasi aset menurut Yulina *et al.*, (2021) bertujuan untuk menjadikan aset bernilai guna yang lebih dan bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung operasional pemerintah dengan maksimal guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mengoptimalisasi potensi dari BMD adalah dengan memanfaatkan BMD tersebut. Kemudian Wahyuni dan Rifki (2020: 137) menjelaskan tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
2. Pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3. Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

2.1.1.3 Indikator Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kuntadi *et al.*, (2022) menjelaskan Optimalisasi dalam pengelolaan aset harus memaksimalkan ketersediaan penggunaan aset (*maximize asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximize asset utilization*) dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Pendapat yang sama menurut Wahyuni dan Rifki (2020: 7) adalah optimalisasi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Minimize cost of ownership* (meminimalkan biaya kepemilikan),
2. *Maximize asset availability* (memaksimalkan ketersediaan aset), dan
3. *Maximize asset utilization* (memaksimalkan penggunaan aset).

Mulyanto *et al.*, (2022) menjelaskan indikator optimalisasi pengelolaan BMD adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan data base.
2. Pemanfaatan aset dengan nilai terbaik.
3. Pengembangan strategi penggunaan asset.

2.1.2 Inventarisasi Aset

2.1.2.1 Pengertian Inventarisasi Aset

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

Wahyuni dan Rifki (2020: 138) menyatakan bahwa inventarisasi merupakan suatu tindakan dengan melakukan pencatatan data aset sesuai dengan perhitungannya, atau pengaturan aset hingga pelaporan dalam pemakaian barang atau aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah yang tercatat dan setiap pemakaian barang akan di dicatat dalam pembukuan. Nama *et al.*, (2020:101) menjelaskan inventarisasi adalah sebagai berikut:

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakinkan kebenaran pemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang daerah. Dari hasil inventarisasi, pemerintah daerah dapat mengetahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki dan kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Menurut Ruda *et al.*, (2023). inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kemudian Suwanda dan Yudi (2022:238) menjelaskan Inventarisasi Aset secara luas adalah sebagai berikut:

Inventarisasi Aset merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan BMD dalam unit pemakaian. Selain itu, inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan fisik barang daerah, meyakinkan kebenaran pemilikan, serta menilai kewajaran sesuai kondisi barang daerah. Dari hasil inventarisasi, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah daerah, kemudian dilakukan penilaiannya sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Chabib dan Rochmansjah (2010) dalam Wahyuni dan Rifki (2020: 141) menjelaskan inventarisasi merupakan salah satu dari tahapan manajemen aset yang berperan penting dalam mendapatkan informasi yang tepat melalui kegiatan pendataan aset, pengumpulan dan pembukuan. Dengan informasi yang tepat dan benar, akan meringankan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengurus aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Inventarisasi menurut Yulina *et al.*, (2021) adalah kegiatan pendataan aset baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dan pendataan aspek legalitas aset secara hukum. Kemudian Kuntadi *et al.*, (2022) menjelaskan tentang inventarisasi aset adalah

Inventarisasi aset adalah proses yang perlu dilakukan oleh pengguna barang meliputi pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi aset sesuai dengan tujuan pengelolaan

manajemen aset. Inventarisasi sekurang-kurangnya lima tahun sekali dan hasilnya dilaporkan kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesai inventarisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Lebih lanjut Wahyuni dan Rifki (2020: 140) menjelaskan inventarisasi aset memiliki dua jenis inventarisasi yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi legalisasi.

1. Inventarisasi fisik meliputi dari keadaan fisik aset seperti bagaimana bentuk aset, luasnya, lokasi dan alamat aset, jenis, jumlah aset dan lain-lain yang berhubungan dengan keadaan fisik.
2. Inventarisasi legalisasi, semua hal tentang aset yang berhubungan dengan masalah legalitas, status kepemilikan aset hingga batas berakhirnya pada penguasaan aset. Kinerja dari dua jenis inventarisasi aset diatas dapat dikerjakan dengan cara pencatatan aset, pengumpulan aset, pemberian label pada aset dan kegiatan pembukuan dilakukan berdasarkan tujuan pada manajemen aset.

2.1.2.2 Tujuan Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset dilaksanakan dengan tujuan untuk mendata aset negara/daerah untuk kemudian dilakukan pencatatan dan dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Dengan adanya laporan inventarisasi juga membantu pemerintah untuk mengetahui data aset yang dimiliki sehingga dapat lebih optimal pemanfaatannya untuk disewakan ke pihak lain dengan demikian juga akan meningkatkan pendapatan negara/daerah (Kuntadi *et al.*, 2022)

Menurut Ruda *et al.*, (2023) Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian Nama *et al.*, (2020:101) menjelaskan pada dasarnya, inventarisasi aset dilakukan untuk:

1. Memberikan keyakinan fisik atas barang yang terdapat dalam dokumen inventaris;
2. Mengetahui kondisi terkini barang, apakah barang tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat;
3. Tercapainya tertib administrasi, sehingga untuk barang yang sudah rusak berat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan, pertanggungjawaban atas barang-barang yang tidak diketemukan/hilang, dan juga pencatatan barang-barang yang belum dicatat dalam dokumen inventaris;
4. Melakukan pendataan atas masalah yang muncul terkait dengan barang milik daerah, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga;
5. Memberikan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan sasaran inventarisasi adalah semua barang-barang Milik/Kekayaan Daerah yang:
 - a. Dibeli/diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD.
 - b. Dibeli/diperoleh dengan sebagian dari dana APBD.
 - c. Dibeli/diperoleh dari dana di luar APBD, misalnya barang hibah, Hasil sitaan, dan sebagainya.
 - d. Belum jelas pemiliknya tetapi dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah

Suwanda dan Yudi (2022:238) inventarisasi aset adalah untuk meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya, mengetahui kondisi terkini barang (baik, rusak ringan, dan rusak berat), melaksanakan tertib administrasi (membuat usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat, mempertanggungjawabkan barang-barang yang tidak diketemukan atau hilang dan mencatat/membukukan barang-barang yang belum dicatat dalam dokumen inventaris, mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga dan menyediakan informasi nilai BMD sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah).

Wahyuni dan Rifki (2020: 139) mengatakan dengan adanya buku inventaris yang lengkap, tertib dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan dalam setiap aset.
2. Usaha dalam pemakaian dan mengoptimalkan pada aset secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi aset.
3. Membantu kegiatan pemerintah.

2.1.2.3 Indikator Inventarisasi Aset

Yulina *et al.*, (2021) berpendapat bahwa terdapat dua aspek dalam inventarisasi aset.

1. Inventarisasi fisik seperti bentuk aset, luas aset, lokasi aset, volume/jumlah aset, jenis, alamat, dan lain-lain
2. Inventarisasi yuridis/legal yaitu status penguasaan aset dan legalitas aset.

Pendapatan yang sama juga dijelaskan oleh Mulyanto *et al.*, (2022) dimana indikator Inventarisasi Aset adalah sebagai berikut:

1. Investasi fisik
2. Investasi yuridis

2.1.3 Legal Audit

2.1.3.1 Pengertian Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset,

identifikasi dan mencari solusi permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Legal audit diperlukan setelah proses inventarisasi aset karena setiap aset yang dimiliki Pemda harus jelas status kepemilikannya, untuk mencegah potensi sengketa ataupun penyerobotan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil aset milik pemda. Dokumen kepemilikan aset tersebut berupa sertifikat untuk aset tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk aset bangunan, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk aset peralatan mesin khususnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat (Ruda *et al.*, 2023).

Wahyuni dan Rifki (2020: 142) menjelaskan legal audit merupakan tahapan dalam manajemen aset yang berhubungan dengan legalitas kepemilikan aset, mengidentifikasi permasalahan legalitas aset, pengalihan aset hingga mencari jalan keluar dan menyelesaikan pada permasalahan legalitas seperti pada permasalahan status kepemilikan aset atau pengalihan pada aset. Kemudian Mangesti *et al.*, (2021:1) menjelaskan secara lebih luas mengenai legal audit adalah:.

Audit hukum atau juga di kenal dengan legal audit adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi target Audit Hukum baik perorangan ataupun lembaga. Hal yang diteliti berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan, harta kekayaan atau aset dan kewajiban atau utang-utangnya, transaksi dan perbuatan hukum, dan/atau berbagai permasalahan hukum yang dihadapi meliputi penanganan atau penyelesaiannya, sehingga dapat diketahui kadar atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum atau sampai seberapa jauh hukum dipatuhi dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan seberapa jauh hukum lebih diterapkan atau ditegakkan.

Utomo (2020:3) menjelaskan legal audit merupakan aktivitas dari proses penilaian terhadap data dan fakta antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan, terutama dalam hal *legal risk aspect* yang pada akhirnya akan membahayakan harta entitas, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan. Menurut Sugiana (2013) dalam Kuntadi *et al.*, (2022) legal audit adalah sebagai berikut:

Legal audit pada aset merupakan kegiatan pengauditan pada permasalahan yang berhubungan dengan legalitas seperti dalam permasalahan kepastian kepemilikan aset, penggunaan aset dan bagaimana pemanfaatan aset, permasalahan pada pemindahan atau pengalihan aset sampai permasalahan lain yang bersangkutan dengan hukum melalui bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Legal audit aset atau uji tuntas hukum menurut Darsana *et al.*, (2023:201) adalah tahapan manajemen aset yang bertujuan memeriksa status kepemilikan, prosedur pengadaan dan alur pengalihan aset. Selain itu, legal audit aset juga berfungsi untuk mencari solusi jika aset terjerat masalah hukum. Kemudian Utomo (2020:4) menjelaskan legal audit adalah sebagai berikut:

Legal audit adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum untuk memperoleh informasi atau fakta material yang benar. Legal audit merupakan proses penilaian terhadap data dan fakta mengenai transaksi yg dilakukan oleh bidang/bagian kerja dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan badan hukum terutama dalam hal *legal risk aspect* yang membahayakan harta atau aset. *Legal risk aspect* yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan dari legal audit merupakan bagian dari proses keterbukaan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Legal Audit

Secara umum tujuan legal audit adalah keterbukaan (disclosure) informasi dan hal ini dikaitkan dengan penekanan jaminan keabsahan (legalitas) objek terkait, dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Sedangkan menurut standar konsultan hukum pasar modal, tujuan legal audit adalah untuk menyajikan fakta-fakta hukum mengenai emiten secara utuh dan menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat materiel yang ditutupi (full disclosure), sedemikian rupa sehingga pihak investor atau bondholders terjamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan). Dengan kata lain, legal audit bertujuan untuk memberikan kepastian dan kejelasan bahwa data dan fakta hukum yang ada pada perusahaan, memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan, memberikan keyakinan dan keamanan pada pihak investor dalam melakukan transaksi (Utomo, 2020:7).

Menurut Wahyuni dan Rifki (2020: 143). Dengan adanya legal audit diharapkan dapat mengurangi resiko terkait masalah hukum atau dapat menurunkan biaya perkara yang harus dikeluarkan yang disebabkan adanya kekosongan dokumen tertulis. Kemudian menurut Permendagri No. 19 tahun 2016 dalam Wahyuni dan Rifki (2020: 143) tujuan legal audit adalah sebagai berikut:

Legal audit dapat berperan dalam tindakan kegiatan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan dalam hal ini pada pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal serta terhindar dari pengambilalihan dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran atau pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan

secara administratif dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surta perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Menurut Mangesti *et al.*, (2021:45) legal audit atau audit hukum merupakan suatu proses yang memotret, mereportase, mendeskripsikan senyatanya secara jeli tentang keberadaan aset dalam suatu institusi. Dari hasil investigasi atau hasil Uji kepatuhan hukum ini dapat dijadikan alat bukti baik bagi penegak hukum khususnya penyidik dan hakim, maupun pihak-pihak yang berperkara. Kemudian tujuan dilakukannya legal audit menurut Utomo (2020:7) adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha:

Lebih lanjut Utomo (2020:5) mengatakan legal audit ditujukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan/pelanggaran perusahaan terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan pendapat hukum yang menyatakan aturan hukum mana yang telah dipatuhi dan aturan hukum mana yang telah dilanggar. Kemudian Wahyuni dan Rifki (2020: 141) menjelaskan tujuan dan fungsi legal audit adalah:

Legal audit dilakukan guna mendapatkan kepastian pada kondisi keamanan aset secara legalitas dan memiliki peran penting dalam melakukan pengoptimalan dalam pengelolaan aset. Legal audit adalah kegiatan dengan kinerja pengauditan pada permasalahan yang berhubungan dengan legalitas seperti dalam permasalahan kepastian kepemilikan aset, penggunaan aset dan bagaimana pemanfaatan aset, permasalahan pada pemindahan atau pengalihan aset sampai permasalahan lain yang bersangkutan dengan hukum dengan bagaimana mencari jalan

keluar dari permasalahan tersebut. Berdasarkan penglihatan kegiatan legal audit dapat mengurangi tingkat resiko pada permasalahan hukum, dapat mengoptimalkan pemanfaat dan pemakaian aset hingga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan legalitas hukum.

2.1.3.3 Indikator Legal Audit

Mulyanto *et al.*, (2022) menjelaskan indikator legal audit adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan hukum
2. Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset

Audit hukum menurut Mangesti *et al.*, (2021:4) memiliki dimensi pencegahan, pengendalian, penyelesaian permasalahan hukum.

1. Dimensi pencegahan, berarti bahwa dengan Audit Hukum dapat dilacak potensi terhadap kemungkinan adanya ketidakpatuhan hukum, pelanggaran hukum, dan prediksi terhadap kemunduran suatu entitas yang diakibatkan ketidakpatuhan hukum yang berasal dari *stake holder*.
2. Dimensi pengendalian, berarti bahwa dengan hasil audit dapat dilakukan pengawasan (*controlling*) terhadap berbagai segmen, unit, departemen, atau bagian-bagian dalam entitas sebelum terjadi ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Munculnya ketidakpatuhan ini biasanya didasari oleh adanya keinginan suatu bagian dari badan usaha, terutama yang berciri *profit oriented* untuk mendapatkan benefit yang setinggi-tingginya. Tetapi pencapaian benefit itu tidak dibarengi ketaatan dan ketuntasan dalam hukum.
3. Dimensi penyelesaian masalah hukum. Penyelesaian masalah hukum merupakan suatu keadaan dimana pada setiap adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, maladministrasi, malpraktik profesi, *abuse of power*, bentuk kejahatan inkonvensional pada hakikatnya harus dibuktikan. Hasil audit hukum dapat menjadi alat bukti karena di dalamnya terdapat laporan nyata atau kondisi faktual dari sebuah badan hukum yang seolah tidak hanya dikuliti tetapi diteliti hingga bagian terdalam, hingga ke akar keadaan yang mungkin justru menjadi pelengkap atas terjadinya perbuatan yang diduga melanggar hukum atau peraturan.

2.1.4 Struktur Birokrasi

2.1.4.1 Pengertian Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata *bureaucracy* (bahasa Inggris *bureau* + *cracy*). Pada organisasi negara, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan negara artinya bahwa pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara. Dalam keseharian istilah birokrasi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat normatif yang dijalankan oleh aktor negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tataran yang lebih praktis Birokrasi dilaksanakan oleh aktor negara atau pemerintah yaitu pejabat dan pegawai pemerintah dalam lingkungan administrasi yang memiliki struktur organisasi dan aturan-aturan yang jelas, formal serta memiliki tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan negara (Rusfiana dan Cahya, 2021:1).

Bersamaan dengan pengertian di atas Prabowo (2022: 81) menjelaskan birokrasi berasal dari kata biro yang berarti kantor, dan kratein yang berarti pemerintah, sehingga dikatakan meja pemerintahan. Tentu saja "aneh" untuk dipahami, tetapi itulah sifat birokrasi. Karena Lembaga ini kokoh dan tampak dikendalikan oleh orang-orang di belakang meja. Menurut Bormasa *et al*, (2023: 10) Ada terdapat 3 pendekatan dalam birokrasi yaitu:

1. Birokrasi selalu di pandang sebagai suatu prosedur rasionalisme dalam pemerintahan dan aparat dipandang sebagai administrasi publik.
2. Birokasi dilihat sebagai organisasi yang sngat besar karena jumlah pegawainya semakin meningkat (*parkinson law*).
3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat (*orwelisasi*).

Bormasa *et al*, (2023: 2) menjelaskan birokrasi merupakan suatu organisasi formal pada bidang kerja yang ada pada suatu instansi atau kantor Pemerintahan. Karena itu birokrasi dapat dipahami sebagai tipe organisasi yang melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan yang bersifat administratif yang melibatkan banyak orang dalam hal koordinasi secara sistematis satu dengan yang lainnya. Kemudian Fauzan *et al.*, (2024:5) menjelaskan pengertian birokrasi secara luas adalah sebagai berikut:

Birokrasi adalah sistem organisasi yang kompleks yang digunakan untuk mengelola dan mengatur tugas-tugas dalam suatu lembaga, organisasi, atau pemerintahan. Birokrasi didasarkan pada aturan, prosedur, hierarki, dan tanggung jawab yang jelas. Tujuan utama dari birokrasi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas organisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Struktur birokrasi sering kali melibatkan berbagai tingkatan hierarki, dimulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai tingkat bawah. Setiap tingkatan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan. Birokrasi juga melibatkan penggunaan aturan tertulis, prosedur standar, dan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif.

Struktur birokrasi pemerintah menurut Rusfiana dan Cahya (2021:1) melibatkan keseluruhan organisasi dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam berbagai unit organisasi pemerintah pada suatu departemen maupun non departemen baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pelayanan umum dan masyarakat.

2.1.4.2 Bentuk Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pemerintah menurut Fauzan *et al.*, (2024:37) bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi ada beberapa elemen umum yang

ditemukan dalam banyak birokrasi. Struktur birokrasi biasanya dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dengan efisien dan efektif.

Fauzan *et al.*, (2024:37) menjelaskan berikut adalah komponen umum dari struktur birokrasi:

1. Departemen atau Kementerian

Birokrasi sering terorganisir dalam departemen, kementerian atau organisasi pemerintah daerah lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan pemerintah. Setiap departemen atau instansi memiliki tanggung jawab tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Unit kerja organisasi pemerintah adalah unit utama dalam struktur birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan dan pelayanan publik. Mereka merupakan elemen penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang vital. Setiap unit atau satuan kerja pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab yang ditentukan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam bidang tertentu. Organisasi pemerintah juga sering kali mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memiliki keahlian yang mendalam dalam masalah masalah yang mereka tangani. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan efektif dalam bidangnya masing-masing. Setiap organisasi pemerintah memiliki struktur organisasi internal yang terdiri dari berbagai bidang/bagian dan subbidang atau subbagian yang lebih kecil. Ini memungkinkan departemen tersebut untuk mengelola berbagai aspek tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efisien.

2. Unit Organisasi

Departemen atau kementerian tersebut dibagi menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil, seperti divisi, direktorat, atau biro. Unit-unit ini memiliki tanggung jawab lebih spesifik dalam mengelola program-program dan layanan-layanan tertentu.

3. Pegawai Negeri

Birokrasi diisi oleh pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) yang dikenal sebagai birokrat. Mereka adalah individu yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan eksekutif. Pegawai negeri biasanya menerima gaji dari pemerintah dan diatur oleh peraturan dan kebijakan pemerintah.

4. Struktur Hirarki

Struktur birokrasi memiliki hierarki yang kuat, di mana atasan memimpin dan mengawasi bawahan. Ini menciptakan tingkat otoritas dan tanggung jawab yang jelas. Di puncak hierarki, ada kepala departemen atau kementerian yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi departemen tersebut.

5. Prosedur dan Aturan

Birokrasi mengikuti prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk mengelola operasi pemerintah. Ini mencakup peraturan internal departemen dan peraturan hukum yang harus diikuti oleh birokrat dalam menjalankan tugas mereka. Prosedur ini membantu memastikan konsistensi dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

6. Bidang Khusus

Birokrasi mungkin memiliki unit-unit yang mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, seperti audit, hukum, sumber daya manusia, atau teknologi informasi. Ini membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang memerlukan keahlian khusus.

2.1.4.3 Indikator Struktur Birokrasi

Menurut Robbins (2002) dalam Prabowo (2022: 81) dominasi peran *technostructure* menciptakan struktur birokrasi mesin, dengan karakteristik:

1. Mempunyai tugas operasi rutin sangat tinggi,
2. Peraturan yang sangat diformalisasi,
3. Tugas yang dikelompokkan kedalam departemen-departemen fungsional,
4. Wewenang yang disentralisasikan,
5. Pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan
6. Sebuah struktur administrasi rumit dengan perbedaan tajam antara aktivitas lini dan staf.

Dengan mengutip pendapat Weber, Rusfiana dan Cahya (2021:64) mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi dalam tipe ideal yang meliputi:

1. Adanya pembagian kerja dan spesialisasi.
Melalui sistem birokrasi dilakukan penempatan personal yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Setiap posisi merupakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab tersendiri. Untuk jaminan agar pelaksanaan tugas sejalan dan sesuai dengan tujuan bersama, mekanisme birokrasi dilengkapi dengan petunjuk tentang tata kerja dan pengaturan batas tanggungjawab. Dengan demikian, dalam susunan birokrasi dapat diketahui siapa dan mengerjakan apa, serta siapa yang bertanggungjawab kepada siapa.

2. Hierarki kekuasaan.

Didalam sistem birokrasi semua posisi diatur dalam susunan hirarki, semua posisi berada dibawah pembinaan dan pengawasan pemegang tugas atau posisi diatasnya. Susunan hirarki ini ditata di dalam suatu jenjang mata rantai perintah dan pertanggungjawaban yang mudah diketahui dalam susunan piramida organisasi.

3. Aturan dan peraturan.

Semua gerak dan pelaksanaan tugas di dalam birokrasi didasarkan kepada aturan perundang-undangan selain sebagai landasan hukum mengenai tugas juga pada tingkat pelaksanaan mengatur cara atau prosedur birokrat dalam melaksanakan tugas. Adanya aturan dan peraturan mengenai materi dan formalitas pelaksanaan tugas seperti ini mendorong birokrasi kepada standarisasi, spesialisasi dan profesionalitas.

4. Sifat tidak pribadi (impersonal).

Hubungan interaksi di dalam birokrasi dikendalikan oleh aturan melalui prosedur dan formalitas sehingga perasaan pribadi lebih dibatasi, dengan cara ini penunjukan seseorang kepada satu posisi tidak atas favorit atau pertimbangan pribadi, tetapi atas kemampuan.

5. Pembentukan karier.

Didalam birokrasi jabatan dan pekerjaan teknis dapat dilakukan sejalan dengan pengembangan sistem karier dengan identifikasi pekerjaan secara teknis. Dengan sistem tersebut calon birokrat dapat dipilih atas pertimbangan teknis seperti melalui ujian atau test akademik, tes keahlian, pertimbangan nilai atau skor keberhasilan, senioritas, dan lain-lain.

6. Birokrasi murni.

Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya.

Menurut Muhammad (2002) dalam Rusfiana dan Cahya (2021:71),

paradigma struktur birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut:

Struktur birokrasi yang ideal harus mampu menyelenggarakan fungsinya secara efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi, birokrasi pemerintahan harus selalu berusaha agar seluruh organisasi birokrasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Organisasi

Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan.

2. Prinsip Kejelasan Misi

Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakannya, baik yang sifatnya pengaturan yang selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan secara transparan, maupun dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan benar, ramah, cepat, tetapi sekaligus akurat.

3. Prinsip Kejelasan fungsi

Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi. Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa:

- a. Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi;
- b. Tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya;
- c. Menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting, kurang penting dan tidak penting.
- d. Jelas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok *clientele* instansi yang sama.

4. Prinsip Kejelasan Aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan. Padahal, karena terbatasnya sarana, prasarana, waktu, dan dana yang tersedia, pemborosan merupakan tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan.

5. Prinsip Kesatuan Arah

Merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan. Bahkan, banyak kegiatan tersebut bersifat spesialis, bergantung pada tuntutan dan kepentingan pihak-pihak yang harus dilayani. Akan tetapi, aneka ragam aktivitas tersebut tetap harus diarahkan pada satu titik kulminasi tertentu, yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Prinsip Kesatuan Perintah

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Sebaliknya, perintah bisa berupa larangan agar bawahan tersebut tidak melakukan tindakan tertentu. Agar perintah yang diberikan dapat terlaksana dengan efektif, sumbernya hanya satu, yaitu atasan langsung dari bawahan yang bersangkutan. Penegasan ini sangat penting sebagai salah satu paradigma birokrasi karena dalam kenyataan sesungguhnya seorang bawahan mempunyai banyak atasan bergantung pada jumlah jenjang jabatan manajerial yang terdapat dalam suatu organisasi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Pauweni *et al.*, (2017) dengan judul Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial inventarisasi, penilaian dan kondisi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, sedangkan legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.

Penelitian Yulina *et al.*, (2021) dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial, inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah. Dan secara simultan, semua variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

Penelitian Mulyanto *et al.*, (2022) dengan judul Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa inventarisasi aset dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset sedangkan legal audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Hasil analisis uji f menunjukan bahwa secara simultan Inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Penelitian Kuntadi *et al.*, (2022) dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset. Hasil kajian *literature review* yang kami lakukan menyatakan adanya pengaruh variabel inventarisasi aset (X_1), legal audit aset (X_2) dan penilaian aset (X_3) terhadap optimalisasi aset (Y)

Penelitian Noviyati dan Rifki (2023,) dengan judul Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yaitu legal audit serta pengawasan dan pengendalian mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY. Sedangkan inventarisasi dan penilaian aset tidak mempengaruhi optimalisasi aset Pemda DIY.

Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pauweni et al., (2017)	Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.	Metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Inventarisasi, penilaian dan kondisi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Sedangkan legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.	a. Variable bebas inventarisasi aset dan legal audit b. Variable terikat optimalisasi pengelolaan aset c. Model analisis	a. Tempat penelitian b. Populasi dan sampel penelitian c. Variabel penilaian dan kondisi aset.

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	Yulina <i>et al.</i> , (2021)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan).	Metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Secara parsial maupun secara simultan inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah	a. Variable bebas inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi b. Variable terikat optimalisasi pengelolaan aset c. Model analisis	a. Tempat penelitian b. Populasi dan sampel penelitian
3	Kuntadi, <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset.	Metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	adanya pengaruh variabel inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi aset	a. Variable bebas inventarisasi aset dan legal audit aset b. Variable terikat optimalisasi pengelolaan aset Model analisis	a. Tempat penelitian b. Populasi dan sampel penelitian c. Variabel penilaian Aset
4	Mulyanto, <i>et al.</i> , (2022)	Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak	Metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Legal audit serta pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Sedangkan inventarisasi dan penilaian aset tidak mempengaruhi	a. Variable bebas inventarisasi aset dan legal audit b. Variable terikat optimalisasi pengelolaan aset c. Model analisis	a. Tempat penelitian b. Populasi dan sampel penelitian c. Variabel pengawasan dan pengendalian serta variabel penilaian.

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Noviyati dan Rifki (2023)	Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda	Legal audit serta pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Sedangkan inventarisasi dan penilaian aset tidak mempengaruhi	a. Variable bebas inventarisasi aset dan legal audit b. Variable terikat optimalisasi pengelolaan aset c. Model analisis	a. Tempat penelitian b. Populasi dan sampel penelitian c. Variabel pengawasan dan pengendalian serta variabel penilaian.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Inventarisasi aset dan Optimalisasi Pengelolaan BMD

Inventarisasi adalah kegiatan pendataan aset baik dari aspek fisik maupun non-fisik, dan pendataan aspek legalitas aset secara hukum. Dengan dilakukannya inventarisasi aset, maka informasi yang lengkap dan akurat dari nilai potensi aset dapat diperoleh. Dengan proses inventarisasi aset yang baik akan dapat menyediakan informasi mengenai aset yang lengkap dan relevan sehingga dapat memaksimalkan potensi aset untuk dimanfaatkan dan memudahkan pejabat dalam melakukan pelaporan barang (Yulina *et al.*, 2021). Inventarisasi aset wajib dilakukan agar pemerintah daerah memiliki pangkalan data atas aset-asetnya secara *up to date* dan lengkap (Kuntadi *et al.*, 2022). Inventarisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD, artinya jika inventarisasi dapat dilakukan secara lebih baik, maka Optimalisasi Pengelolaan BMD akan lebih baik (Yulina *et al.*, 2021).

2.3.2 Hubungan Legal Audit dan Optimalisasi Pengelolaan BMD

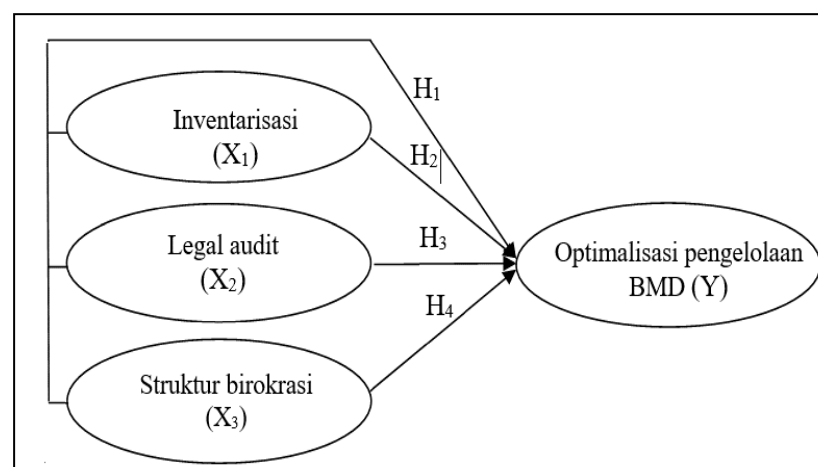
Legal audit merupakan aktivitas untuk pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Kebijakan yang bisa diterapkan dalam aspek legal audit adalah melegalkan kepemilikan aset secara fisik dan yuridis. Plangisasi adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melegalkan kepemilikan aset yang dimilikinya namun dalam kondisi tidak terpakai (*idle*). Plangisasi bertujuan untuk menetapkan aset milik pemerintah agar tidak digunakan oleh warga secara ilegal. Legalitas menjadi faktor penting dalam pengelolaan aset daerah. Legal Audit Aset sebagai bukti bahwa pemerintah sebagai pemilik aset yang sah (Kuntadi *et al.*, 2022). Kegiatan legal audit aset dapat mengurangi tingkat risiko pada permasalahan hukum, dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan pemakaian aset hingga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum. (Sugiyama, 2013) Dengan legal audit pemerintah akan terhindar dari masalah hukum sehingga pengelolaan barang milik daerah akan semakin optimalisasi (Yulina *et al.*, 2021). Legal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD, artinya jika legal audit dapat dilakukan secara lebih aktif dan menyeluruh, maka Optimalisasi Pengelolaan BMD akan lebih baik (Yulina *et al.*, 2021)

2.3.3 Hubungan Struktur Birokrasi dan Optimalisasi Pengelolaan BMD

Unit kerja organisasi pemerintah adalah unit utama dalam struktur birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kebijakan dan pelayanan publik. Mereka merupakan elemen penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang vital. Setiap unit atau satuan kerja pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab yang ditentukan dalam pembuatan, pelaksanaan, dan

pengawasan kebijakan dalam bidang tertentu. Organisasi pemerintah juga sering kali mengkhususkan diri dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat memiliki keahlian yang mendalam dalam masalah masalah yang mereka tangani. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kebijakan yang relevan dan efektif dalam bidangnya masing-masing. Setiap organisasi pemerintah memiliki struktur organisasi internal yang terdiri dari berbagai bidang/bagian dan subbidang atau subbagian yang lebih kecil. Ini memungkinkan departemen tersebut untuk mengelola berbagai aspek tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efisien dan efektif (Fauzan *et al.*, 2024:37). Struktur birokrasi yang baik akan memiliki SOP (*Standard Operational Procedures*) yang baik dan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab yang jelas tanpa adanya tumpang tindih (Yulina *et al.*, 2021). Struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD, artinya jika struktur birokrasi dapat dilakukan secara lebih baik, maka Optimalisasi Pengelolaan BMD akan lebih baik (Yulina *et al.*, 2021)

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konsep penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan kepustakaan dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H₁: Inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H₂: Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H₃: Legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- H₄: Struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berlokasi di Kota Jantho. Objek penelitian adalah pejabat daerah yang terdiri dari sekretariat, kepala Subbagian Keuangan dan Pengguna BMD.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas dan variable terikat. Penelitian korelasional (*Correlational Studies*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variable (Arikunto, 2020:247-248). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas terdiri dari inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi sementara variabel terikat berupa optimalisasi pengelolaan BMD.

3.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi *cross-sectional*. Studi *cross-sectional* adalah sebuah studi dapat dilakukan dengan data

hanya sekali dikumpulkan (Adiputra *et al.*, 2021:51). Penelitian ini dilakukan sejak Bulan Oktober November 2024 hingga Februari 2025.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Adiputra *et al.*, 2021:99). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada kelompok pejabat daerah. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat daerah, pengguna barang dan bendaharawan barang yang terlibat dalam pengelolaan BMD.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin di investigasikan (Wibowo, 2021:98). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah pada seluruh SKPD di Aceh Besar yang berjumlah sebanyak 66 pejabat atau pada masing-masing SKPD mewakili atau terpilih 2 (dua) sampel yang terdiri dari Kepala Subbagian Keuangan dan Pengelola BMD sebagai pihak yang sehari-hari terlibat dalam pengelolaan BMD.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Wibowo, 2021:101). Penarikan sampel

berpedoman pada pendapat Wibowo (2021:111) yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Dinas	Kepala Subbagian Keuangan	Bendahara wan Pengeluaran	Jumlah Sampel
1	Sekretaris			
	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	1	1	2
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	1	1	2
	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	2
	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	2
2	Dinas			
	Dinas Kesehatan	1	1	2
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	2
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	2
	Dinas Perhubungan	1	1	2
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	2
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1	1	2
	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	2
	Dinas Pertanian	1	1	2
	Dinas Pangan,	1	1	2
	Dinas Pariwisata	1	1	2
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	1	2
	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	2
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	2

No	Dinas	Kepala Subbagian Keuangan	Bendahara wan Pengeluaran	Jumlah Sampel
	Dinas Pendidikan	1	1	2
	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1	1	2
	Dinas Sosial	1	1	2
	Dinas Tenaga Kerja	1	1	2
	Dinas Syariat Islam	1	1	2
	Dinas Pertanahan	1	1	2
	Satuan Polisi Pamong Praja dan WH	1	1	2
3	Badan			
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	2
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	2
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	2
	Inspektorat Daerah	1	1	2
Jumlah		33	33	66

Sumber: Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Besar, 2024

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability* sampel jenuh. *Non probability* adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Adiputra *et al.*, 2021: 277). Teknik *non probability sampling* jenuh (*sensus*) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, istilah lain dari sampel jenuh adalah *sensus* (Adiputra *et al.*, 2021: 278)

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Suhartanto *et al.*, 2023: 43). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan membagikan lembar pertanyaan (Kuesioner). Kuesioner adalah “daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tempat jawaban bagi responden” (Suhartanto *et al.*, 2023:43). Kuesioner terdiri dari 7 (tujuh) item pertanyaan untuk pengumpulan data karakteristik organisasi, 5 (lima) item pertanyaan untuk pengumpulan data karakteristik pekerjaan dan 5 (lima) item pertanyaan untuk pengumpulan data prestasi kerja. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

Untuk memperoleh nilai dari instrument pengumpulan data maka digunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur item-item pernyataan yang bersifat positif Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur item-item pernyataan yang bersifat positif maupun negatif terhadap masalah yang diteliti (Rahabav, 2023:113) Alternatif penilaian dalam pengukuran untuk item-item yang bersifat positif adalah dari jawaban responden mulai dari jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju dengan nilai kategori 1-5. Nilai kategori dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan 4 (empat) variabel terdiri dari tiga variabel bebas yaitu inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2), struktur birokrasi (X_3) dan satu variabel terikat yaitu optimalisasi pengelolaan BMD (Y). Karakteristik variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
Dependen						
1	Optimalisasi pengelolaan BMD (Y)	hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Pengoptimalan aset harus dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan dengan menekan biaya operasional (Wahyuni dan Rifki, 2020: 137)	1. <i>Minimize cost of ownership</i> (meminimalkan biaya kepemilikan)	1-5	Likert	A1
			2. <i>Maximize asset availability</i> (memaksimalkan ketersediaan aset)			A2
			3. <i>Maximize asset utilization</i> (memaksimalkan penggunaan aset).			A3

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan perangkat SPSS versi 22 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Optimalisasi pengelolaan BMD

α = Konstanta

β = Parameter Regresi

X_1 = Inventarisasi aset

X_2 = Legal audit

X_3 = Struktur birokrasi

ε = Epsilon

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *reliability* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.

Validitas dari suatu perangkat tes dapat diartikan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauhmana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak di ukur. Artinya instrumen dapat mengungkapkan data dari variabel secara tepat tidak menyimpang dari kenyataan sebenarnya. (Ovan dan Saputra, 2020:2).

Pengukuran validitas untuk penggunaan kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan validitas konstruk (*construct validity*) dimana sebuah kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan dikatakan valid jika setiap butir pertanyaan

tersebut memiliki keterkaitan yang tinggi dengan yang lainnya (Ovan dan Saputra, 2020:3). Validitas konstruk diuji melalui analisis *bivariate correlation*, jika nilai korelasi hasil uji tersebut di peroleh di atas 0,3 maka sebuah kuesioner di katakana valid atau sebaliknya (Ovan dan Saputra, 2020:3).

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlations* dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom (df)*=n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan peberhemajan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki realiability tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Reliabilitas adalah istilah yang di pakai untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih (Ovan dan Saputra, 2020:4). Menurut Aditya, *et al.*, (2022: 78) suatu hasil uji variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai di atas 0,6.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara sensus dengan menggunakan parameter regresi linier berganda..

3.7.1 Uji Secara Simultan

Terima H_a jika $\beta_i (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \neq 0$

Terima H_o jika $\beta_i (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 0$

H_{o1} : $\beta_i=0$; Inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

H_{a1} : $\beta_i \neq 0$; Inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

3.7.2 Uji Parsial

Terima H_a jika $\beta \neq 0$

Terima H_o jika $\beta = 0$

H_{o2} : $\beta_1=0$; Inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

H_{a2} : $\beta_2 \neq 0$; Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

H_{o3} : $\beta_2=0$; Legal audit tidak berpengaruh terhadap optimalisasi

pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar .

Ha3 : $\beta_2 \neq 0$; Legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Ho4 : $\beta_3 = 0$; struktur birokrasi tidak berpengaruh terhadap terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar .

Ha4 : $\beta_3 \neq 0$; struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan usia (tingkatan umur), jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan golongan kepangkatan pejabat daerah (Kasubbag Keuangan) dan Pengelola Barang Milik Daerah yang terdata dan bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Besar. Responden tersebut dipilih secara sensus dari seluruh SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah sebanyak 33 SKPD dengan jumlah pejabat dan pengelolaan barang sebanyak 66 orang atau masing-masing SKPD terpilih 2 (dua) sampel untuk pengisian kuesioner. Mereka memiliki usia (tingkatan umur), jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja dan golongan kepangkatan yang berbeda. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Umur	31-35 Tahun	9	13.6
		36-40 Tahun	31	47.0
		41-45 Tahun	23	34.8
		46-50 Tahun	3	4.5
		Total	66	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	55	83.3
		Perempuan	11	16.7
		Total	66	100,0
3	Pendidikan	DIII	8	12.1
		S1	40	60.6
		S2	18	27.3
		Total	66	100,0

No	Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
4	Masa kerja	6-10 Tahun	19	28.8
		11-15 Tahun	23	34.8
		16-20 Tahun	24	36.4
		Total	66	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.1 menjelaskan dari hasil pendataan terhadap 66 pejabat daerah yang terdata pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dapat dijelaskan bahwa sebahagian besar atau 47,0% dari jumlah pejabat berumur antara 36-40 tahun. Kemudian di ikuti umur antara 41-45 tahun dengan jumlah pejabat daerah sebanyak 34,8%. Ada 4,5% dari jumlah pejabat daerah dengan usia antara 46-50 tahun. Selebihnya 13,6% dari jumlah pejabat daerah berusia lebih muda dengan umur antara 31-35 tahun. Pejabat daerah yang terdata pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebahagian besar atau 83,3% berjenis kelamin laki-laki. Hanya 16,7% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 60,6% dari jumlah pejabat daerah yang terdata dan bekerja pada SKPD Kabupaten Aceh Besar dengan latar belakang pendidikan SI. Ada 27,3% dari jumlah pejabat daerah dengan tingkat pendidikan S2. Selebihnya 12,1% dari jumlah pejabat daerah dengan tingkat pendidikan DIII. Pejabat daerah yang terdata pada SKPD Kabupaten Aceh Besar sebahagian besar atau 36,4% telah bekerja selama 16-20 tahun. Ada 28,8% dari jumlah pejabat daerah yang baru bekerja selama 6-10 tahun. Selebihnya 34,8% dari jumlah pejabat daerah yang terdata dengan masa kerja antara 11-15 tahun.

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD

Tabel 4.2
Gambaran Optimalisasi Pengelolaan BMD Pada SKPD
di Kabupaten Aceh Besar

No	Optimalisasi Pengelolaan BMD	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Instansi selalu mengendalikan biaya perawatan dan perbaikan aset dengan membatasi penggunaan aset untuk kegiatan yang tidak penting.	0	0,0	0	0,0	23	34.8	36	54.5	7	10.6	3,76
2	Instansi selalu menambah aset-aset yang dibutuhkan secara lebih modern dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.	0	0,0	0	0,0	8	12.1	44	66.7	14	21.2	4,09
3	Instansi selalu menata kebutuhan aset serta memperbaiki aset-aset yang rusak dan terbengkalai untuk dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhan instansi.	0	0,0	0	0,0	31	47.0	28	42.4	7	10.6	3,64
Rata-rata												3,83

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.2 atas menjelaskan optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,83. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini

menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang pada SKPD Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju tentang sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan BMD tersebut. Kalaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Optimalnya pengelolaan BMD pada SKPD Kabupaten Aceh Besar terutama didukung oleh indikator memaksimalkan ketersediaan aset dengan nilai jawaban 4.09. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju jika Instansi selalu menambah aset-aset yang dibutuhkan secara lebih modern dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara memaksimalkan penggunaan aset menjadi indikator yang masih rendah dalam optimalisasi gelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 3.64. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya, namun mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang menjawab setuju jika instansi selalu menata kebutuhan aset serta memperbaiki aset-aset yang rusak atau ter bengkalai untuk digunakan kembali sesuai kebutuhan instansi.

4.2.2 Variabel Inventarisasi Aset

Tabel 4.3
Gambaran Inventarisasi Aset pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar

No	Inventarisasi BMD	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Pengelola barang selalu mencatat, medeteksi dan melaporkan setiap tambahan aset, aset yang sedang digunakan dan aset yang mengalami kerusakan.	0	0,0	0	0,0	19	28.8	36	54.5	11	16.7	3.88
2	Seluruh aset Instansi memiliki Hak Kepemilikan (BPKB, Sertefikat dan lainnya) yang sah dan kuat sehingga terhindar dari masalah hukum.	0	0,0	4	6.1	10	15.2	34	51.5	18	27.3	4.00
Rata-rata												3,94

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.3 atas menjelaskan inventarisasi aset pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,94. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelolaan barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju tentang sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan inventarisasi aset tersebut. Walaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Baiknya inventarisasi aset pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar terutama didukung oleh indikator inventarisasi yuridis/legal (status penguasaan aset dan

legalitas aset) dengan nilai jawaban 4.00. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju jika instansi telah memiliki Hak Kepemilikan yang sah dan kuat (BPKB, Sertefikat tanah dan lainnya) atas seluruh aset yang dimiliki sehingga terhindar dari masalah hukum.

Sementara inventarisasi fisik menjadi indikator inventarisasi yang masih rendah dalam optimalisasi gelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 3.88. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya, namun mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang menjawab setuju jika pengelola barang selalu mencatat, medeteksi dan melaporkan setiap tambahan aset, aset yang sedang digunakan dan aset yang mengalami kerusakan.

4.2.3 Variabel Legal Audit

Tabel 4.4
Gambaran Legal Audit BMD pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

No	Legal Audit	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Inspektorat selalu melakukan pemeriksaan secara berkala atas kekuatan hukum seluruh aset Instansi.	0	0,0	0	0.0	19	28.8	36	54.5	11	16.7	3.88

No	Legal Audit	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
2	Inspektorat telah menetapkan prosedur pengendalian yang jelas untuk memperkuat Hak Kepemilikan Aset.	0	0,0	0	0.0	22	33.3	40	60.6	4	6.1	3.73
3	Inspektorat telah menyelesaikan seluruh masalah hukum atas aset tetap yang bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya.	0	0,0	4	6.1	21	31.8	34	51.5	7	10.6	3.67
	Rerata	3,76										

Sumber : Data Primer (diolah), 2025

Tabel 4.4 atas menjelaskan legal audit BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,76. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelolaan barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju tentang sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan legal audit BMD tersebut. Kalaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Baiknya legal audit BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar terutama didukung oleh indikator pencegahan dengan nilai jawaban 3.88. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab

setuju jika inspektorat selalu melakukan pemeriksaan secara berkala atas kekuatan hukum seluruh aset Instansi.

Sementara indikator penyelesaian masalah hukum, menjadi indikator legal audit yang masih rendah dalam optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 3.67. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya, namun mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang menjawab setuju jika inspektorat telah menyelesaikan seluruh masalah hukum atas aset tetap yang bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya.

4.2.4 Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 4.5
Gambaran Struktur Birokrasi pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

No	Struktur Birokrasi	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki tanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan aset kepada pimpinan.	0	0,0	4	6.1	11	16.7	34	51.5	17	25.8	3,97
2	Jumlah Aset tetap instansi selalu berubah sesuai dengan Misi yang akan di capai Instansi.	0	0,0	13	19.7	16	24.2	23	34.8	14	21.2	3,58

No	Struktur Birokrasi	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg Setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
3	Penambahan dan Penggunaan Aset selalu terdistribusi untuk kepentingan Bidang Kerja secara merata.	0	0,0	6	9.1	13	19.7	34	51.5	13	19.7	3,82
4	Penambahan dan Penggunaan Aset selalu dilakukan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.	0	0,0	4	6.1	21	31.8	34	51.5	7	10.6	3,67
5	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki arah pelaksanaan pengelolaan aset yang setara dengan aturan yang berlaku.	0	0,0	0	0,0	21	31.8	34	51.5	11	16.7	3,85
6	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki kedudukan yang terpisah dari bidang lainnya namun satu kesatuan di bawah pimpinan Kadis.	0	0,0	0	0.0	20	30.3	35	53.0	11	16.7	3.86
Rerata		3,79										

Sumber : Data Primer (diolah), 2024)

Tabel 4.5 atas menjelaskan struktur birokrasi dalam pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sudah relatif baik dengan nilai jawaban 3,79. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelolaan barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju

tentang sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan struktur birokrasi tersebut. Kalaupun ada yang menjawab pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Struktur birokrasi dalam pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar terutama didukung oleh indikator prinsip organisasi dengan nilai jawaban 3.97. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar menjawab setuju jika Pengelolaan dan Bendaharawan Barang memiliki tanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan aset kepada pimpinan.

Sementara prinsip kejelasan misi menjadi indikator struktur birokrasi yang masih rendah dalam gelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan nilai jawaban 3.58. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya, namun mendekati 4 (skor untuk kategori pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan pengelola barang menjawab setuju jika jumlah Aset tetap instansi selalu berubah sesuai dengan Misi yang akan di capai Instansi.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Hasil Uji Instrumen

4.3.1.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh alat pengukur dapat mengungkapkan gejala-gejala yang sebenarnya yang ingin diukur mengenai

inventarisasi BMD, legal audit, struktur birokrasi dan Optimalisasi Pengelolaan BMD. Pengukuran validitas angket ini dilakukan dengan menggunakan *korelasi product moment pearson*. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai korelasinya hitung melebihi dari nilai korelasi tabel pada taraf signifikansi 5% dan df 66 yaitu 0,207. Hasil Uji validitas dapat dilihat Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 66	Keterangan
A1	Optimalisasi Pengelolaan BMD	0,693	0,202	Valid
A2		0,749	0,202	Valid
A3		0,519	0,202	Valid
B1	Inventarisasi Aset	0,815	0,202	Valid
B2		0,883	0,202	Valid
C1	Legal Audit	0,859	0,202	Valid
C2		0,872	0,202	Valid
C3		0,760	0,202	Valid
D1	Struktur birokrasi	0,736	0,202	Valid
D2		0,695	0,202	Valid
D3		0,727	0,202	Valid
D4		0,515	0,202	Valid
D5		0,422		
D6		0,714	0,202	Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2024

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk data optimalisasi pengelolaan BMD yang terbentuk dari item pertanyaan A1-A3, data inventarisasi aset yang terbentuk dari item pertanyaan B1-B2, data legal audit yang terbentuk dari item pertanyaan C1-C3 dan data struktur birokrasi yang terbentuk dari item pertanyaan D1-D5 seluruhnya memiliki nilai korelasi lebih besar dari nilai kritis *product-moment* level of significant 5% (0,202). Dengan demikian dapat dikatakan semua pernyataan yang digunakan

dalam interumen pengumpulan data dalam penelitian ini sudah dapat dinyatakan valid atau sesuai dengan kenyataan yang diharapkan terjadi.

4.3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah pengujian tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam suatu gejala atau kejadian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang melibatkan sekelompok item pertanyaan tentang variabel penelitian yang harus di uji kestabilan dan konsistensinya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *Cronbach's Alpha*, dengan standar alfa minimal 0,60. Kuesioner dapat dinyatakan dapat dipercaya jika memenuhi aspek konsistensi dengan nilai $\alpha > 0,60$. Hasil Uji reliabilitas dapat dilihat Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Indikator	Nilai Alpha	Keterangan
1	Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)	3	0,744	Handal
2	Inventarisasi Aset (X_1)	3	0,609	Handal
3	Legal Audit (X_2)	3	0,756	Handal
4	Struktur birokrasi (X_3)	6	0,706	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2024

Uji reliabilitas terhadap 3 (tiga) atribut pertanyaan yang terlibat dalam pengumpulan data variabel optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (Y), 2 (dua) atribut pertanyaan yang terlibat dalam pengumpulan data variabel inventarisasi aset (X_1), 3 (tiga) atribut pertanyaan yang terlibat dalam pengumpulan data variabel legal audit (X_2) dan 6 (enam) atribut pertanyaan yang terlibat dalam pengumpulan data variabel struktur birokrasi (X_3) sebagaimana yang diperlihatkan Tabel di atas diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar

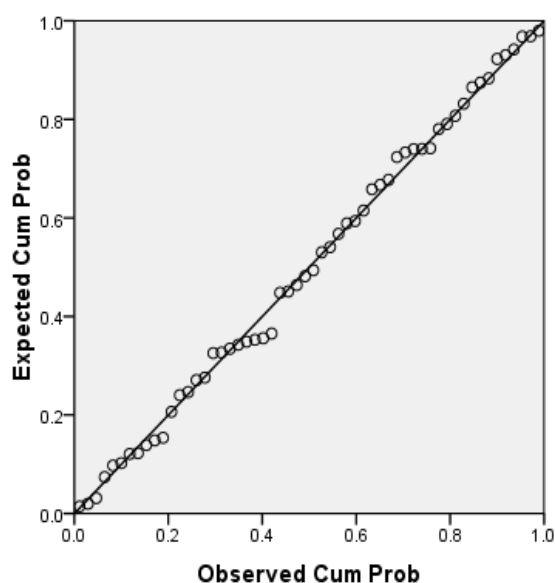
0,744, 0,609, 0,756, dan 0,706. Dengan demikian nilai-nilai dari atribut yang terlibat dalam variabel penelitian tersebut sudah memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* karena nilai alpha melebihi dari 0,60.

4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.3.2.1 Hasil Pengujian Normalitas

Baik data skala optimalisasi pengelolaan BMD (Y), inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) harus mencerminkan data skala yang bebas dari pengganggu atau residual. Untuk menguji apakah distribusi nilai-nilai sampel pada variabel penelitian sesuai dengan distribusi teoritis, maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan gambar normal P –P Plot. Gambar ini menunjukkan sebaran *standardized residual* berada dalam kisaran garis diagonal seperti terlihat pada gambar berikut:

Normal P-P Plot of Optimalisasi Pengelolaan BMD



Gambar 4. 1 Grafik P-P Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar normal P-P Plot di atas menunjukkan bahwa data observasi untuk variabel optimalisasi pengelolaan BMD dengan jumlah sebaran data sebanyak 66 dan seluruhnya tersebar mendekati garis distribusi normal, sehingga seluruh data yang digunakan telah terdistribusi secara normal begitu juga untuk tiga variabel lainnya sebagaimana Terlampir.

4.3.2.2 Pengujian Multikolinieritas

Hubungan linier tiga variabel bebas yang digunakan dalam model regresi linier dalam penelitian ini yaitu tata inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) harus selalu sempurna atau bebas dari ketergantungan yang akan mempengaruhi nilai parameter regresi. Ketergantungan antara dua variabel bebas tersebut dapat di deteksi melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dihasilkan dari analisis *collinearity diagnostics* dalam paket SPSS regresi linier. Jika VIF tersebut lebih besar dari 10,0 maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini diyakini mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Sebaliknya apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,0 dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Inventarisasi aset (X_1)	0,458	2.181	Non Multikolinieritas
2	Legal audit (X_2)	0,728	1.373	Non Multikolinieritas
3	Struktur birokrasi (X_3)	0,496	2.018	Non Multikolinieritas

Sumber :Data Primer (diolah), 2024

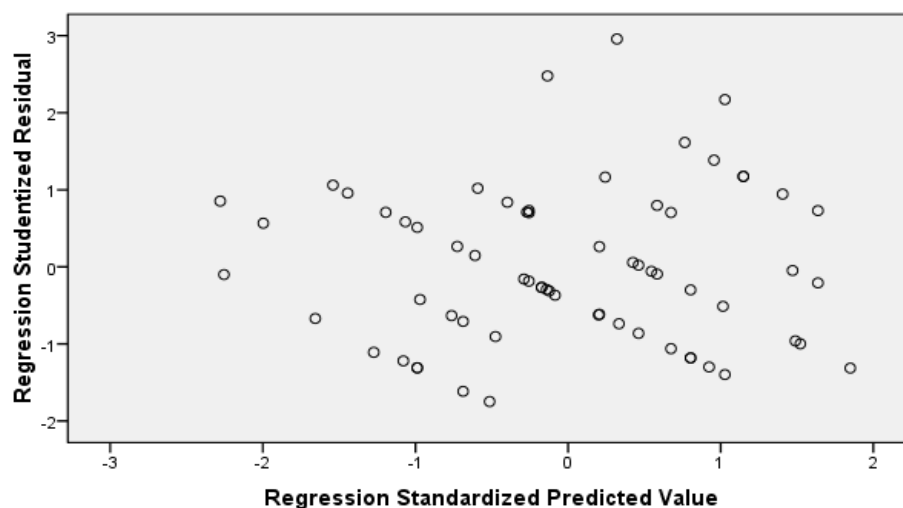
Hasil pengujian multikolinieritas pada Tabel 4.8 menunjukkan nilai VIF dari tiga variabel bebas yang terlibat dalam model analisis yaitu inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) masing-masing $< 10,0$, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel bebas tersebut. Dengan demikian model regresi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini masing-masing diprediksi secara terpisah oleh kekuatan masing-masing variabel dan tidak terjadi ketergantungan secara berarti, sehingga model tersebut sudah dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

4.3.2.3 Heteroskedastisitas

Asumsi dari penggunaan data skala dalam model regresi linier berpotensi terjadinya gangguan (*disturbance*) yang di kenal dengan gangguan *Homoscedastic*. Homoscedastic terjadi jika data dari variabel tata Inventarisasi Aset (X_1), Legal Audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) mempunyai varian yang sama dengan Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y), sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan prediktif.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Sementara jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas. Output SPSS hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2 Scatterplot Optimalisasi Pengelolaan BMD

Berdasarkan chart diatas terlihat bahwa terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar keatas dan dibawah 0, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuktikan dengan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Analisis ini bertujuan untuk memprediksi sejauh mana tingkat kenaikan interval dari 3 (tiga) variabel bebas yang terlibat dalam penelitian ini yaitu inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) terhadap kenaikan variabel terikat yaitu optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar (Y) pada tingkat kesalahan (*signifcansi*) 5% atau dimana pengaruh antar variabel tersebut benar-

benar nyata pada taraf 5%. Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Model Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,964	0,403	
	Inventarisasi aset	0,241	0,109	0,300
	Legal audit	0,240	0,103	0,251
	Struktur birokrasi	0,266	0,130	0,269

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

4.4.1 Koefisien Regresi (β)

Dari hasil output spss pada Tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,964 + 0,241X_1 + 0,240X_2 + 0,266X_3$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta optimalisasi pengelolaan BMD sebesar = 0,964 menjelaskan jika inventarisasi aset (X_1) dan legal audit (X_2) tidak dilaksanakan dan struktur birokrasi (X_3) tidak dilibatkan dalam pengelolaan BMD, maka optimalisasi pengelolaan BMD (Y) pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar secara konstan adalah sebesar 0,964 satuan. Kondisi ini menandakan tingkat optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar masih tergolong rendah.
2. Koefisien regresi pengaruh inventarisasi aset adalah sebesar 0,241 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu satuan pada kegiatan inventarisasi aset maka akan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMD pada

SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,241 satuan. Hal ini dikarenakan dengan dilakukannya inventarisasi aset, maka adanya informasi yang lengkap dan akurat dari nilai potensi aset (Yulina *et al.*, 2021). Kemudian dengan inventarisasi aset SKPD memiliki pangkalan data atas aset-asetnya secara *up to date* dan lengkap (Kuntadi *et al.*, 2022).

3. Koefisien regresi pengaruh legal audit oleh inspektorat adalah sebesar 0,240 menjelaskan setiap adanya kenaikan satu satuan pada penerapan legal audit maka akan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,240 satuan. Hal ini dikarenakan legal audit dapat mengamankan dan pemeliharaan aset daerah dengan baik dari penyalahgunaan aset secara illegal. Legal audit dapat memperjelas kepemilikan aset secara fisik dan yuridis sebagai bukti bahwa pemerintah sebagai pemilik aset yang sah (Kuntadi *et al.*, 2022). Legal audit juga dapat mengurangi tingkat risiko pada permasalahan hukum hingga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum, sehingga pemerintah terhindar dari masalah hukum (Yulina *et al.*, 2021).
4. Koefisien regresi pengaruh struktur birokrasi sebesar 0,266 menjelaskan setiap meningkatnya satu satuan pada struktur birokrasi pemerintah maka akan dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan setiap unit atau satuan kerja pemerintah merupakan elemen penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang vital dan memiliki tanggung jawab dalam setiap pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian organisasi pemerintah memiliki

struktur organisasi internal yang terdiri dari berbagai bidang/bagian dan subidang atau subbagian yang lebih kecil. Ini memungkinkan departemen tersebut untuk mengelola berbagai aspek tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efisien dan efektif (Fauzan *et al.*, 2024:37).

4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara inventarisasi aset, struktur birokrasi dan legal audit dengan Optimalisasi Pengelolaan BMD pejabat daerah memiliki hubungan yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien diterminansi. Koefisien korelasi ini menjelaskan keeratan hubungan keseluruhan variabel bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1 sampai dengan +1 dan semakin mendekati nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien dterminasi berganda adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dari hasil out put SPSS dapat diketahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi.

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,689	0,475	0,449

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Koefisien korelasi R sebesar 0,689 menjelaskan inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) secara simultan memiliki hubungan

positif dengan optimalisasi pengelolaan BMD (Y) pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan keeratan hubungan 68,9%. Hubungan tersebut tergolong erat.

Koefisien determinasi R Square sebesar 0,475 menjelaskan, peran variabel inventarisasi aset (X_1), legal audit (X_2) dan struktur birokrasi (X_3) dalam mempengaruhi optimalisasi pengelolaan BMD (Y) pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 0,475 atau 47,5%. Sementara sisa (nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,525 atau 52,50% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

H_1 : Nilai $\beta_1=0,241$, $\beta_2= 0,240$, dan $\beta_3= 0,266$ berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1=\beta_2=\beta_3\neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulina *et al.*, (2021) dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa secara simultan inventarisasi aset, legal audit, dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H₂: Nilai $\beta_1 = 0,241$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 \neq 0$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulina *et al.*, (2021) dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa inventarisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

H₃: Nilai $\beta_2 = 0,240$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_2 \neq 0$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya penerapan Legal Audit berpengaruh terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulina *et al.*, (2021) dengan judul pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa legal audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

H₄: Nilai $\beta_3 = 0,266$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_3 \neq 0$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulina *et al.*, (2021) dengan judul pengaruh inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi terhadap optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa struktur birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi barang milik daerah.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini telah dapat menimbulkan implikasi yang positif bagi semua pihak khususnya bagi SKPD di Kabupaten Aceh Besar sebagai tempat dilakukannya penelitian. Walaupun pengelolaan BMD di Kabupaten Aceh Besar hingga saat ini tidak ada masalah dan temuan-temuan kerugian keuangan daerah, namun pengelolaan BMD belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Sehingga Kabupaten Aceh Besar perlu melakukan inventarisasi BMD secara lebih baik dan perlu melakukan legal audit secara berkala untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset. Kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap optimalnya pengelolaan BMD. Kemudian pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu memperbaiki struktur birokrasi agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan aset dan penggunaan aset yang lebih efektif tanpa pemborosan biaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Inventarisasi aset, legal audit dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
2. Inventarisasi aset berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
3. Legal audit berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.
4. Struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Saran-saran

Mengingat inventarisasi BMD, legal audit dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD, maka penulis menyarankan:

1. SKPD di Kabupaten Aceh Besar perlu memaksimalkan penggunaan aset dengan melakukan penataan kebutuhan aset serta memperbaiki aset-aset yang rusak atau terbengkalai sehingga dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan instansi.

2. SKPD di Kabupaten Aceh Besar dengan bantuan Inspektorat perlu menyelesaikan seluruh masalah hukum atas aset tetap yang bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya selama ini.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu menambah dan penggunaan Aset untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Untuk penelitian yang akan datang perlu menggunakan indikator yang lebih banyak sehingga dapat mewakili semua data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I, Made Sudarma., Ni Wayan Trisnadewi, Ni Putu Wiwik Oktaviani, (2021) *Metodologi Penelitian Kesehatan* Medan: Yayasan Kita Menulis
- Aditya, Addin., Yekti Asmoro Kanthi., Siti Aminah., (2022) *Metodologi Penelitian Ilmiah Dalam Disiplin Ilmu Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arikunto Suharsimi (2020) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Bormasa, Monica Feronica., Ahmad Rosandi Sakir., Ahmad Mustanir., Nur Rohim Yunus Ade Putra Ode Amame., Neng Suryanti Nengsih dan Amtai Alaskan (2023) *Birokrasi Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Darsana, I Made., Siska Yuli Anita., Meilinda Trisilia dan Teguh budi Rahardjo (2023) *Operasional Manajemen*. Bandung: Intelektual Manifes Media.
- Fauzan., Nina Sa'idah Fitriyah., dan Muh Hamdi Zain, (2024) *Birokrasi Dan Publik Governance*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Kuntadi, Cris., Arum Indri Retnoningsih., dan Dian Asri Finlandia (2022) Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol 3, Issue 4, Hal 422-425.
- Mangesti, Yovita Arie., Slamet, Suhartono., Dan Gregorius Yoga Panji Asmara (2021) *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)* Karanganyer: CV. Cipta Mandiri Solusindo
- Mulyanto, Muh Yamin Noch, Zakaria, Fahrudin Pasolo dan Yaya Sonjaya (2022) Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak. *SEIKO : Journal of Management & Business* Vol 6 Issue 1 Hal 161 – 184.
- Nama, I Ketut., Sri Suharsih., Rini Dwi Astuti dan Astuti Rahayu (2020) *Pengelolaan Aset Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran”
- Noviyati, Arlisa Mustika dan Rifki Khoirudin (2023,) Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, Vol: 1, No 2, Hal: 1-11.
- Ovan dan Andika Saputra (2020). *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendhiakia Indonesia

- Pauweni, Sherly., Herman, Karamoy dan Hendrik Gamaliel (2017) Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* Vol 8 No.2. Hal 50-60.
- Prabowo, Hadi (2022) *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Bimedia Pustaka Utama.
- Rahabav, Patrisius (2023) *Metode Penelitian Sosial: Pedoman Praktis Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor No 28 Tahun 2020 *tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Ruda, Elisabeth Emarlin., Wilhelmina, Mitran dan Yoseph, Darius P. Rangga (2023) Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset Dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JRIME : Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi* Vol.1, No.4 Hal 145-166.
- Rusfiana, Yudi dan Cahya, Supriatna (2021) *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sherly., Herman, Karamoy dan Hendrik Gamaliel (2017) dengan judul Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* Vol 8 No.2. Hal 50-60.
- Suhartanto, Dwi., Fatya Alty Amalia., Mukhamad Najib · 2023 *Metode Riset Bisnis: Dasar-Dasar Mendesain Dan Melakukan Riset Bisnis*. Surabaya: Uwais Inspirasi Indonesia
- Suwanda, Dadang dan Yudi, Rusfiana (2022) *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Utomo, Laksanto (2020) *Legal Audit Legal Opinion (Due Dilligence)*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.
- Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin (2020) *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka

Wibowo, Agung Edy (2021) *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Kalikebet: Insania.

Yulina, Bainil., Evada Dewata., Anggeraini Oktarida., Pridson Mandiangan., dan Ayu Chotibah (2021) Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9 ISAS* Hal 193-200.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

KUESIONER

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr Responden

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang benar. Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

Nomor Sampel :

Keterangan: Jawablah pertanyaan anda sebenar-benarnya dengan memberi tanda (✓) pada kotak yang anda anggap benar

A. Identitas Konsumen/Responden

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Umur : ☐ 31 - 35 Tahun
☐ 36 - 40 Tahun
☐ 41 - 45 Tahun
☐ 46 - 50 Tahun
☐ >50 Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan

4. Pendidikan : ☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
☐ S.3
5. Masa Kerja : ☐ <10 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ 26-20 Tahun
6. Gol Pangkat : ☐ IIIa-IIIb
☐ IIIc-IIId
☐ IVa-IVb
☐ IVc-IVd

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek ($\checkmark$) pada angka pilihan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

NO	B. Optimalisasi Pengelolaan Aset Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Sgt Tdk Set uju	Tdk Set uju	Krg Set uju	Set uju	Sgt Set uju
1.	Instansi selalu mengendalikan biaya perawatan dan perbaikan dengan membatasi penggunaan aset untuk kegiatan yang tidak penting.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Instansi selalu menambah aset-aset yang dibutuhkan secara lebih modern dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Instansi selalu menata kebutuhan aset serta memperbaiki aset-aset yang rusak atau terbengkalai untuk digunakan semua sesuai kebutuhan instansi.	☐	☐	☐	☐	☐

NO	C. Inventarisasi Aset Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Sgt Tdk Set uju	Tdk Set uju	Krg Set uju	Set uju	Sgt Set uju
1.	Pengelola barang selalu mencatat, medeteksi dan melaporkan setiap tambahan aset, aset yang sedang digunakan dan aset yang mengalami kerusakan.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Instansi telah memiliki Hak Kepemilikan yang sah dan kuat (BPKB, Sertefikat tanah dan lainnya) atas seluruh aset yang dimiliki sehingga terhindar dari masalah hukum.	☐	☐	☐	☐	☐
NO	D. Legal Audit Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Sgt Tdk Set uju	Tdk Set uju	Krg Set uju	Set uju	Sgt Set uju
1.	Inspektorat selalu melakukan pemeriksaan secara berkala atas kekuatan hukum seluruh aset Instansi	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Inspektorat telah menetapkan prosedur pengendalian yang jelas untuk memperkuat Hak Kepemilikan Aset.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Inspektorat telah menyelesaikan seluruh masalah hukum atas aset tetap yang bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya.	☐	☐	☐	☐	☐
NO	E. Struktur Birokrasi Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Sgt Tdk Set uju	Tdk Set uju	Krg Set uju	Set uju	Sgt Set uju
1.	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki tanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan seluruh pengeloalan aset kepada pimpinan yang berada di atasnya.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Jumlah Aset tetap instansi selalu berubah sesuai dengan Misi yang akan di capai.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Penambahan dan Penggunaan Aset selalu terdistribusi untuk kepentingan Bidang Kerja	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Penambahan dan Penggunaan Aset selalu dilakukan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi amsyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki arah pelaksanaan pengelolaan aset yang setara dengan aturan yang berlaku.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki kedudukan yang terpisah dari bidang lainnya namun satu kesatuan di bawah pimpinan Kadis.	☐	☐	☐	☐	☐

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
D1	66	2.00	5.00	3.9697	.82219
D2	66	2.00	5.00	3.5758	1.03865
D3	66	2.00	5.00	3.8182	.85771
D4	66	2.00	5.00	3.6667	.75107
D5	66	3.00	5.00	3.8485	.68483
D6	66	3.00	5.00	3.8636	.67679
X3	66	2.80	5.00	3.7364	.63649
Valid N (listwise)	66				

Lampiran 2. Data Tabulasi Kuesioner

NO	KARAKTERISTIK				OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD				IVENTARISASI			LEGAL AUDIT				STRUKTUR BIROKRASI							
					A1	A2	A3	Y	B1	B2	X1	C1	C2	C3	X2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	X3	
1	4	1	2	3	4	4	4	4.00	4	5	4.50	4	4	4	4.00	5	2	4	4	4	4	3.83	
2	4	1	2	2	3	4	4	3.67	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	4	5	4	3	4	4.00	
3	3	1	2	4	5	5	4	4.67	5	4	4.50	5	4	4	4.33	4	5	5	4	5	5	4.67	
4	3	1	3	2	4	4	3	3.67	4	4	4.50	4	4	5	4.33	5	3	4	5	4	4	4.17	
5	3	1	3	3	3	3	3	3.00	3	3	3.00	3	3	3	3.00	3	2	3	4	4	3	3.17	
6	5	1	2	4	4	5	4	4.33	4	5	4.50	3	3	4	3.00	5	4	4	4	5	4	4.33	
7	4	2	2	3	3	4	4	3.67	3	4	3.50	3	3	2	2.67	2	5	2	4	3	3	3.17	
8	3	1	2	3	3	3	3	3.00	3	4	3.50	4	4	3	3.67	4	2	3	3	3	3	3.00	
9	3	2	2	4	5	5	5	5.00	4	5	4.50	5	4	4	4.33	4	5	4	3	5	4	4.17	
10	3	1	3	3	3	4	3	3.33	4	3	3.50	3	3	4	3.33	3	4	4	2	3	4	3.33	
11	4	1	2	4	4	4	3	3.67	3	4	3.50	3	3	3	3.00	4	3	3	3	4	3	3.33	
12	3	1	2	2	4	4	3	3.67	5	4	4.50	5	4	3	4.00	4	3	5	4	4	5	4.17	
13	3	1	2	4	4	4	4	4.00	5	5	5.00	5	4	4	4.33	5	4	4	4	4	5	4.33	
14	3	1	3	3	4	4	3	3.67	3	4	3.50	3	3	3	3.00	3	3	3	3	3	3	3.00	
15	4	2	1	3	3	3	3	3.00	3	2	2.50	3	3	4	3.33	4	3	4	4	5	3	3.83	
16	2	1	2	2	3	4	4	3.67	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	2	4	3	3	4	3.33	
17	3	1	3	3	4	4	5	4.33	5	5	5.00	5	4	5	4.67	5	4	4	3	3	5	4.00	
18	3	1	1	2	3	4	4	3.67	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	4	5	4	4	4	4.17	
19	4	1	1	3	4	4	3	3.67	4	4	4.00	3	3	3	4.00	4	4	4	3	4	4	3.83	
20	4	2	3	4	3	3	3	3.00	3	3	3.00	4	4	3	3.67	3	4	2	4	4	3	3.33	
21	3	1	2	2	3	3	3	3.00	3	2	2.50	3	3	3	3.00	2	2	2	4	4	3	2.83	
22	2	1	2	2	4	5	4	4.33	5	4	4.50	5	5	4	4.67	4	5	5	4	5	5	4.67	
23	3	1	2	2	3	4	4	3.67	5	4	4.50	4	4	4	4.00	4	5	5	4	3	5	4.33	
24	4	1	3	4	3	5	5	4.33	4	5	4.50	4	4	4	4.00	5	3	4	5	3	4	4.00	
25	3	1	2	4	3	4	3	3.33	4	3	3.50	3	3	3	3.00	4	4	4	4	4	4	4.00	
26	3	1	2	4	3	4	4	3.67	4	5	4.50	4	4	4	4.00	5	4	4	4	3	4	4.00	
27	3	2	3	3	5	5	4	4.67	4	5	4.50	4	4	5	4.33	5	5	4	4	4	4	4.33	
28	3	1	2	3	4	4	3	3.67	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	2	3	3	4	4	3.33	
29	3	1	2	4	4	4	3	3.67	3	4	3.50	4	4	3	3.67	3	4	4	2	4	4	3.50	
30	4	1	3	3	4	4	3	3.67	4	3	3.50	3	3	4	3.33	5	5	5	5	3	4	4.50	
31	2	1	2	2	4	4	3	3.67	3	3	3.00	4	4	4	4.00	4	2	4	4	4	3	3.50	
32	4	1	2	4	4	4	4	4.00	4	4	4.00	4	4	4	4.00	4	4	5	4	3	3	3.83	
33	2	1	3	2	3	4	3	3.33	3	2	2.50	3	3	4	3.33	2	2	2	3	3	3	2.50	
34	2	1	2	3	4	4	3	3.67	3	4	3.50	4	4	3	3.67	3	3	3	3	3	3	3.00	
35	4	1	2	2	4	4	3	3.67	4	5	4.50	4	4	3	3.67	4	4	4	2	4	4	3.67	
36	3	1	2	2	4	4	3	3.67	4	4	4.00	4	4	3	3.67	4	3	4	3	4	4	3.67	
37	4	1	2	3	4	4	4	4.00	3	4	3.50	3	3	4	3.33	5	4	3	4	4	3	3.83	
38	5	2	2	4	4	4	4	4.00	4	5	4.50	4	4	4	4.00	5	5	4	4	3	4	4.17	
39	3	1	3	3	3	4	3	3.33	3	2	2.50	3	3	3	3.00	3	3	4	3	3	3	3.17	
40	4	1	2	4	5	5	5	5.00	4	3	3.50	5	5	4	4.67	4	4	3	3	5	4	3.83	
41	5	1	2	4	3	4	3	3.33	4	4	4.00	4	3	2	3.00	4	3	3	3	3	4	3.83	
42	4	1	2	4	4	4	4	4.00	5	5	5.00	5	4	5	4.67	5	5	4	4	4	5	4.50	
43	4	1	3	3	3	4	4	3.67	4	4	4.00	4	4	2	3.33	4	4	4	4	4	4	4.00	
44	3	1	3	4	4	4	4	4.00	5	5	5.00	4	4	4	4.00	4	3	4	4	4	5	4.00	
45	2	1	2	2	4	4	4	4.00	3	4	3.50	4	4	4	4.00	4	3	4	4	4	3	3.67	
46	3	1	3	3	3	5	5	4.33	4	4	4.00	4	4	4	4.00	5	5	4	5	3	4	4.33	
47	4	1	2	4	4	4	4	4.00	5	5	5.00	3	3	3	4.00	4	5	5	5	4	5	4.67	
48	4	2	3	3	5	5	4	4.67	4	4	4.00	5	5	5	5.00	4	4	4	3	3	4	3.67	
49	3	1	2	2	3	4	3	3.33	3	4	3.50	4	4	4	4.00	2	2	2	4	4	4	3.00	
50	4	1	1	4	4	4	4	4.00	4	4	4.00	4	3	5	4.00	4	5	5	4	4	3	4.17	
51	4	1	2	4	5	5	4	4.67	4	5	4.50	5	5	4	4.67	4	5	5	4	5	5	4.67	
52	2	2	2	2	4	5	5	4.67	4	5	4.50	4	4	5	4.33	5	3	4	5	5	4	4.33	
53	4	1	2	4	4	4	3	3.67	4	3	3.50	4	4	4	4.00	4	2	5	3	4	4	3.67	
54	4	1	3	4	4	4	3	3.67	4	5	4.50	4	4	4	4.00	4	4	4	4	5	4	4.17	
55	3	1	2	3	4	4	4	4.00	5	4	4.50	3	3	3	3.00	4	3	4	3	4	4	3.67	
56	3	1	2	3	4	4	3	3.67	4	3	3.50	4	3	2	3.00	4	4	3	2	4	4	3.50	
57	2	1	3	2	4	4	4	4.00	4	4	4.00	4	4	3	3.67	3	4	2	4	4	3	3.33	
58	3	2	1	4	3	3	3	3.00	3	4	3.50	4	3	3	3.67	3	2	4	3	3	3	3.00	
59	3	1	2	3	4	4	3	3.67	3	4	3.50	5	4	4	4.33	4	3	3	3	4	3	3.33	
60	3	1	2	2	4	5	3	4.00	4	4	4.00	4	4	4	4.00	5	4	4	5	4	4	4.33	
61	3	2	1	3	5	5	4	4.67	4	5	4.50	3	3	3	3.00	4	2	5	3	5	4	3.83	
62	4	1	1	4	3	3	3	3.00	4	3	3.50	4	4	4	4.00	3	2	3	4	4	4	3.33	
63	3	2	3	2	4	5	5	4.67	5	4	4.50	4	4	3	3.67	5	5	4	4	5	5	4.67	
64	2	1	2	2	4	4	4	4.00	4	4	4.00	3	4	4	3.67	4	3	3	4	4	3	3.50	
65	3	1	1	3	4	4	4	4.00	4	5	4.50	4	4	4	4.00	3	4	4	4	3	4	3.67	
66	4	1	2	4	3	3	3	3.00	3	4	3.50	3	3	3	3.00	5	4	4	3	4	4	4.00	

Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data

Frequency Table

Umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-35 Tahun	9	13.6	13.6	13.6
	36-40 Tahun	31	47.0	47.0	60.6
	41-45 Tahun	23	34.8	34.8	95.5
	46-50 Tahun	3	4.5	4.5	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	55	83.3	83.3	83.3
	Perempuan	11	16.7	16.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	DIII	8	12.1	12.1	12.1
	SI	40	60.6	60.6	72.7
	S2	18	27.3	27.3	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pengalaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6-10 Tahun	19	28.8	28.8	28.8
	11-15 Tahun	23	34.8	34.8	63.6
	16-20 Tahun	24	36.4	36.4	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Instansi selalu mengendalikan biaya perawatan dan perbaikan dengan membatasi penggunaan aset untuk kegiatan yang tidak penting.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	23	34.8	34.8	34.8
	Setuju	36	54.5	54.5	89.4
	Sgt Setuju	7	10.6	10.6	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Instansi selalu menambah aset-aset yang dibutuhkan secara lebih modern dan berkualitas untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	8	12.1	12.1	12.1
	Setuju	44	66.7	66.7	78.8
	Sgt Setuju	14	21.2	21.2	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Instansi selalu menata kebutuhan aset serta memperbaiki aset-aset yang rusak atau terbengkalai untuk digunakan semua sesuai kebutuhan instansi.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	31	47.0	47.0	47.0
	Setuju	28	42.4	42.4	89.4
	Sgt Setuju	7	10.6	10.6	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pengelola barang selalu mencatat, medeteksi dan melaporkan setiap tambahan aset, aset yang sedang digunakan dan aset yang mengalami kerusakan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	19	28.8	28.8	28.8
	Setuju	36	54.5	54.5	83.3
	Sgt Setuju	11	16.7	16.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Instansi telah memiliki Hak Kepemilikan yang sah dan kuat (BPKB, Sertefikat tanah dan lainnya) atas seluruh aset yang dimiliki sehingga terhindar dari masalah hukum.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	6.1	6.1	6.1
	Krg Setuju	10	15.2	15.2	21.2
	Setuju	34	51.5	51.5	72.7
	Sgt Setuju	18	27.3	27.3	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Inspektorat selalu melakukan pemeriksaan secara berkala atas kekuatan hukum seluruh aset Instansi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	19	28.8	28.8	28.8
	Setuju	36	54.5	54.5	83.3
	Sgt Setuju	11	16.7	16.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Inspektorat telah menetapkan prosedur pengendalian yang jelas untuk memperkuat Hak Kepemilikan Aset.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg Setuju	22	33.3	33.3	33.3
	Setuju	40	60.6	60.6	93.9
	Sgt Setuju	4	6.1	6.1	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Inspektorat telah menyelesaikan seluruh masalah hukum atas aset tetap yang bermasalah dengan masyarakat atau pihak lainnya.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	6.1	6.1	6.1
	Krg Setuju	21	31.8	31.8	37.9
	Setuju	34	51.5	51.5	89.4
	Sgt Setuju	7	10.6	10.6	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki tanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan aset kepada pimpinan.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	6.1	6.1	6.1
	Krg Setuju	11	16.7	16.7	22.7
	Setuju	34	51.5	51.5	74.2
	Sgt Setuju	17	25.8	25.8	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Jumlah Aset tetap instansi selalu berubah sesuai dengan Misi yang akan di capai Instansi.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	13	19.7	19.7	19.7
	Krg Setuju	16	24.2	24.2	43.9
	Setuju	23	34.8	34.8	78.8
	Sgt Setuju	14	21.2	21.2	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Penambahan dan Penggunaan Aset selalu terdistribusi untuk kepentingan Bidang Kerja secara merata.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	6	9.1	9.1	9.1
	Krg Setuju	13	19.7	19.7	28.8
	Setuju	34	51.5	51.5	80.3
	Sgt Setuju	13	19.7	19.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Penambahan dan Penggunaan Aset selalu dilakukan untuk berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk Setuju	4	6.1	6.1	6.1
	Krg Setuju	21	31.8	31.8	37.9
	Setuju	34	51.5	51.5	89.4
	Sgt Setuju	7	10.6	10.6	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki arah pelaksanaan pengelolaan aset yang setara dengan aturan yang berlaku.					
Valid		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Krg Setuju	21	31.8	31.8	31.8
	Setuju	34	51.5	51.5	83.3
	Sgt Setuju	11	16.7	16.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Pejabat Pengelolaan aset dan Bendaharawan Barang memiliki kedudukan yang terpisah dari bidang lainnya namun satu kesatuan di bawah pimpinan Kadis.					
Valid		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Krg Setuju	20	30.3	30.3	30.3
	Setuju	35	53.0	53.0	83.3
	Sgt Setuju	11	16.7	16.7	100.0
	Total	66	100.0	100.0	

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Case Processing Summary			
Cases	Valid	N 66	% 100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.744	.753	3

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
A1	3.7576	.63393	66
A2	4.0909	.57452	66
A3	3.6364	.67108	66

Summary Item Statistics							
	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.828	3.636	4.091	.455	1.125	.055	3

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	7.7273	1.248	.492	.381	.749
A2	7.3939	1.104	.755	.571	.456
A3	7.8485	1.177	.494	.376	.756

Reliability

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	66	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	66	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.609	.618	2

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.8788	.66830	66
B2	4.0000	.82275	66

Summary Item Statistics							
Item Means	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
	3.939	3.879	4.000	.121	1.031	.007	2

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	4.0000	.677	.448	.200	. ^a
B2	3.8788	.447	.448	.200	. ^a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Reliability

Case Processing Summary			
Cases	Valid	N	%
	Excluded ^a	0	.0
	Total	66	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.756	.777	3

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.87879	.668296	66
C2	3.72727	.569628	66
C3	3.66667	.751068	66

Summary Item Statistics							
	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.758	3.667	3.879	.212	1.058	.012	3

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	7.39394	1.258	.660	.643	.587
C2	7.54545	1.390	.729	.661	.546
C3	7.60606	1.381	.424	.189	.883

Reliability

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	66	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	66	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.706	.707	6

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
D1	3.9697	.82219	66
D2	3.5758	1.03865	66
D3	3.8182	.85771	66
D4	3.6667	.75107	66
D5	3.8485	.68483	66
D6	3.8636	.67679	66

Summary Item Statistics							
Item Means	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
	3.790	3.576	3.970	.394	1.110	.021	6

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	18.7727	6.578	.573	.363	.622
D2	19.1667	6.264	.448	.233	.671
D3	18.9242	6.533	.548	.397	.629
D4	19.0758	7.825	.305	.129	.704
D5	18.8939	8.342	.217	.075	.724
D6	18.8788	7.124	.578	.393	.632

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas

Correlations Correlations					
		A1	A2	A3	Y
A1	Pearson Correlation	1	.484**	-.102	.693**
	Sig. (2-tailed)		.000	.415	.000
	N	66	66	66	66
A2	Pearson Correlation	.484**	1	.047	.749**
	Sig. (2-tailed)	.000		.707	.000
	N	66	66	66	66
A3	Pearson Correlation	-.102	.047	1	.519**
	Sig. (2-tailed)	.415	.707		.000
	N	66	66	66	66
Y	Pearson Correlation	.693**	.749**	.519**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	66	66	66	66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Correlations Correlations				
		B1	B2	X1
B1	Pearson Correlation	1	.448**	.815**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	66	66	66
B2	Pearson Correlation	.448**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	66	66	66
X1	Pearson Correlation	.815**	.883**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	66	66	66
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Correlations

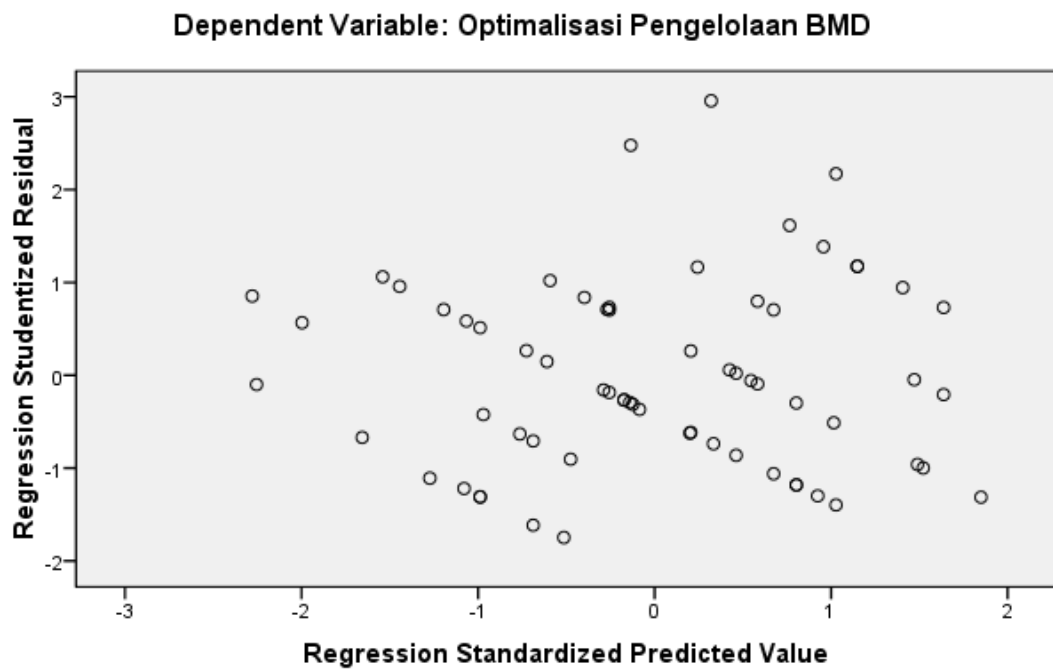
		Correlations			
		C1	C2	C3	X2
C1	Pearson Correlation	1	.801**	.378**	.859**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000
	N	66	66	66	66
C2	Pearson Correlation	.801**	1	.432**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	66	66	66	66
C3	Pearson Correlation	.378**	.432**	1	.760**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000
	N	66	66	66	66
X2	Pearson Correlation	.859**	.872**	.760**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	66	66	66	66

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

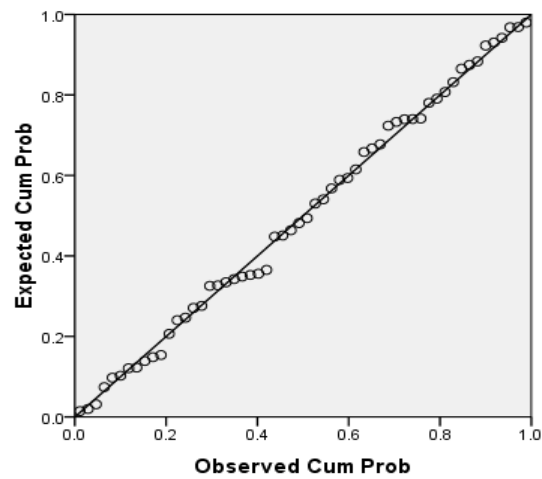
		Correlations						
		D1	D2	D3	D4	D5	D6	X3
D1	Pearson Correlation	1	.345**	.516**	.332**	.183	.435**	.736**
	Sig. (2-tailed)		.005	.000	.006	.141	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
D2	Pearson Correlation	.345**	1	.361**	.230	.103	.420**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.005		.003	.063	.411	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
D3	Pearson Correlation	.516**	.361**	1	.191	.136	.540**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.124	.277	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66
D4	Pearson Correlation	.332**	.230	.191	1	.110	.151	.515**
	Sig. (2-tailed)	.006	.063	.124		.381	.225	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66

Charts Scatterplot



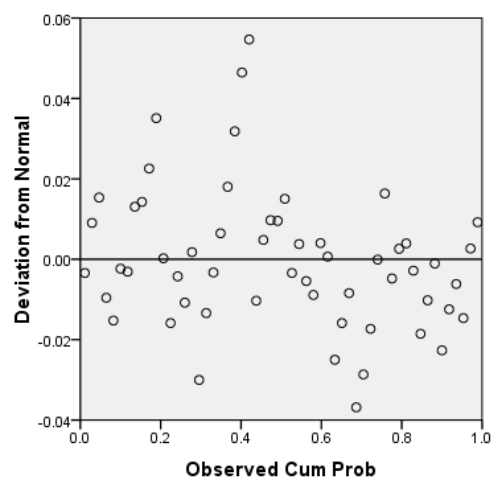
Lampiran 7. Hasil Uji Normalitas

PPlot
Optimalisasi Pengelolaan BMD
Normal P-P Plot of Optimalisasi Pengelolaan BMD



Transforms: difference(10)

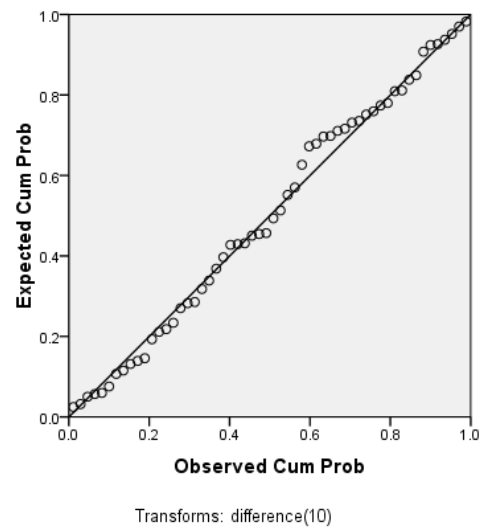
Detrended Normal P-P Plot of Optimalisasi Pengelolaan BMD



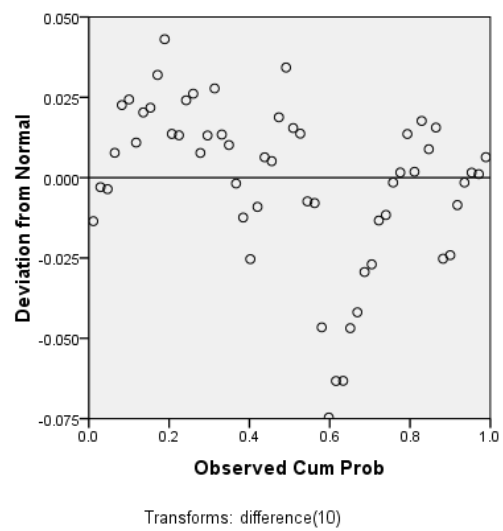
Transforms: difference(10)

Struktur birokrasi

Normal P-P Plot of Struktur birokrasi

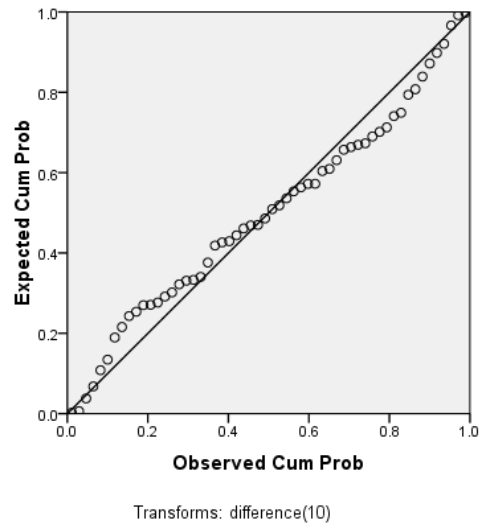


Detrended Normal P-P Plot of Struktur birokrasi

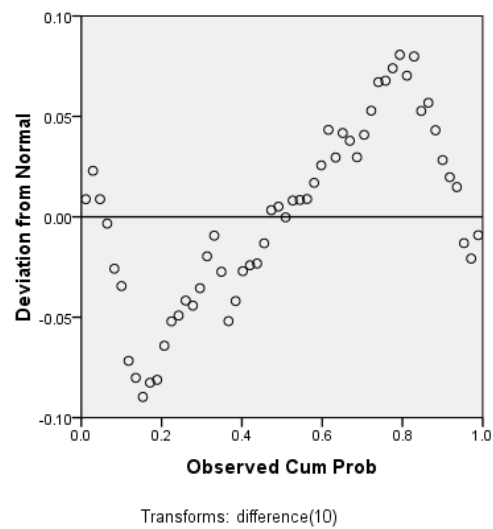


Legal audit

Normal P-P Plot of Legal audit



Detrended Normal P-P Plot of Legal audit



Inventarisasi Aset

Normal P-P Plot of Inventarisasi Aset



Detrended Normal P-P Plot of Inventarisasi Aset

